

**KEMAMPUAN APARATUR PEKON PATOMAN DAN PEKON  
GEMAHRIPAH KECAMATAN PAGELARAN SERTA PEKON  
MARGAKAYA DAN PEKON REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DITA MAHARANI**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **KEMAMPUAN APARATUR PEKON PATOMAN DAN PEKON GEMAHRIPAH KECAMATAN PAGELARAN SERTA PEKON MARGAKAYA DAN PEKON REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Oleh

**DITA MAHARANI**

Keuangan desa diharapkan dapat membantu pembangunan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, namun dalam pengelolaannya masih ditemukan permasalahan seperti di tahap perencanaan tidak semua aparatur memiliki keahlian dalam bidang teknologi, dan kurangnya komunikasi antaraparatur maupun dengan kepala pekon. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan aparatur dalam bidang teknis, sosial dan konseptual dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kemampuan aparatur Pekon Patoman, Gemahripah, Margakaya dan Rejosari dalam pengelolaan keuangan desa rendah. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dan untuk mengumpulkan data baik primer maupun sekunder dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitan menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab rendahnya kemampuan aparatur pada indikator teknis, sosial dan konseptual. Pertama pada kemampuan teknis, kurangnya kesadaran aparatur dalam pemanfaatan teknologi guna menambah pengetahuan pengelolaan keuangan pekon, kurangnya pengalaman dalam pengelolaan keuangan pekon, kurangnya intensitas pelatihan, terbatasnya aparatur yang bisa mengoperasikan komputer. Kedua, kemampuan sosial kurangnya koordinasi secara formal maupun informal, dan tidak memiliki grup *WhatsApp*. Terakhir, kemampuan konseptual disebabkan aparatur yang kurang memahami pembuatan RAB karena sumber daya aparatur pekon rendah dan kurangnya tempat berkonsultasi dalam pembuatan RAB.

**Kata kunci: kemampuan, aparatur pekon, pengelolaan keuangan desa**

## **ABSTRACT**

### **THE CAPACITY OF THE APPARATUS IN PATOMAN AND GEMAHRIPAH VILLAGE DISTRICT OF PAGELARAN, AND ALSO MARGAKAYA AND REJOSARI VILLAGE DISTRICT OF PRINGSEWU IN MANAGEMENT OF VILLAGE FINANCE**

**By**

**DITA MAHARANI**

Village finance is expected to assist in village development and administration of village governance, but in its management it is still found problems such as in the planning stage not all apparatus have expertise in technology, and the lack of interpersonal communication between the apparatus and the head of the village. Therefore, the capacity of apparatus in technical, social and conceptual in village finance management is needed.

This research aims to find out the cause why the capacity of Patoman, Gemahripah, Margakaya and Rejosari village apparatus in village finance management are low. The method used in this research was descriptive qualitative, and to collect primary and secondary data the researcher used interview, observation and documentation technique.

The result of the research showed that there are some cause the apparatus were categorized as less capacity in technical, social and conceptual indicators. First, the technical capacity in managing the village finance of apparatus were categorized as less capacity because of lack of awareness of apparatus in using technology to level up their knowledge about management of village finance. Moreover, the lack of experience of apparatus in village finance management, the lack of training intensity and not all the apparatus that can operate the computer. Second, the social capacity of apparatus were categorized as less capable because of lack of coordination either formally or informally, and they have no massanger group as WhatsApp to communicate. Third, conceptual capacity of apparatus were categorized as less capacity because the apparatus have a poor understanding in preparation of real estimate of cost (RAB), it happened due to the low quality of human resources of apparatus and there was no no adequate place to consult about RAB for the apparatus.

**Keyword: capacity, village apparatus, management of village finance**

**KEMAMPUAN APARATUR PEKON PATOMAN DAN PEKON  
GEMAHRIPAH KECAMATAN PAGELARAN SERTA PEKON  
MARGAKAYA DAN PEKON REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

**Oleh**

**DITA MAHARANI**

**Skripsi**

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

Judul Skripsi : **KEMAMPUAN APARATUR PEKON PATOMAN  
DAN PEKON GEMAHRIPAH KECAMATAN  
PAGELARAN SERTA PEKON MARGAKAYA DAN  
PEKON REJOSARI KECAMATAN PRINGSEWU  
DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Nama Mahasiswa : **Dita Maharani**

No. Pokok Mahasiswa : **1416021036**

Jurusan : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Drs. Denden Karnia Drajat, M.Si.**  
NIP 19600729 199010 1 001

**Budi Harjo, S.Sos., M.IP.**  
NIP 19680112 199802 1 001

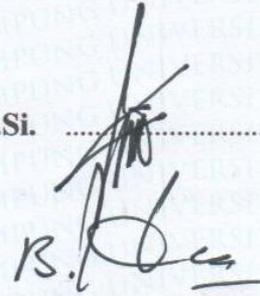
2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP.**  
NIP 19611218 198902 1 001

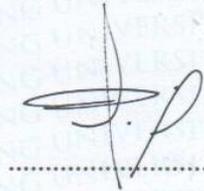
**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.** .....



Sekretaris : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP.** .....



Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dr. Syarif Makhya**  
NIP. 19590803 198603 1 003



Tanggal Lulus Ujian : **25 April 2018**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak benar dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 25 April 2018

Yang Membuat Pernyataan,



Dita Maharani  
NPM. 1416021036

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dita Maharani, penulis dilahirkan di Pringsewu, pada tanggal 5 November 1995, sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Ahmad Dani dan Ibu Humairoh. Penulis mengawali pendidikan formal pertama kali pada Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA) 2 Pringsewu diselesaikan pada tahun 2002, lalu melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 2 Pringsewu Timur pada tahun 2002-2008, setelah itu melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Pringsewu pada tahun 2008-2011, dan dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Pringsewu pada tahun 2011-2014.

Tahun 2014 Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Selama proses kuliah Penulis juga aktif dalam kegiatan HMJ Ilmu Pemerintahan sebagai anggota Biro 1. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada tahun 2017 di Kampung Gaya Baru IV, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”  
(Q.S Al-Insyirah 5-8)

“Jika Allah membuatmu menunggu, maka bersiaplah untuk menerima lebih dari yang kamu inginkan dan bayangkan, Allah Maha Baik”  
(Tausiyah Cinta)

“Setelah aku menangis, aku memutuskan untuk bertarung sekuat tenaga. Yang ada dalam pikiranku adalah menang, maju ke depan dan bertambah kuat”  
(Yuuki Asuna)

“Berdoa, berusaha, lihat peluang, dan tetap *berhusnudzon* karena semuanya yang terjadi pada diri kita adalah yang terbaik dari Allah”  
(Dita Maharani)

## PERSEMBAHAN

Dengan Rasa Syukur Kupersembahkan Karya Kecilku ini kepada:

Kedua Orang Tuaku

Ahmad Dani (Ayah) Terimakasih untuk semua kasih sayang, dukungan, doa, ajaran mengenai kejujuran, kepedulian, dan berbuat baik kepada semua orang sehingga diriku bisa berhasil menyelesaikan *study* dengan damai dan menyelesaikan karyaku dengan menikmati segala prosesnya.

Humairoh (Ibu) terimakasih untuk seluruh kasih sayang, doa dan semua lelahmu dalam membantu meringankan beban sehingga diriku dapat selalu termotivasi dan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam segala hal.

Kepada Adikku

Terimakasih untuk Dhea Khansa Nabila yang selalu memberikan keceriaan dan nasihat membuat diriku menjadi lebih baik dari yang sebelumnya.

Kepada seluruh keluarga besar

Terimakasih selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku semakin percaya diri dalam melangkah.

Kepada teman-temanku

Terimakasih untuk seluruh teman-teman yang selalu memberikan perhatian, dan kasih sayang sehingga diriku dapat menyelesaikan karyaku dengan sukses.

Almamater tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu, teman, keluarga, dan merancang harapan sebagai salah satu langkah menuju kesuksesan

## SANWACANA

*Alhamdulillahillobbil'aalamiin*, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul “**Kemampuan Aparatur Pekon Patoman dan Pekon Gemahripah Kecamatan Pagelaran serta Pekon Margakaya dan Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu dalam Pengelolaan Keuangan Desa**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Pada proses penulisan skripsi, penulis mendapat bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan, dan Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar membimbing dan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini, terimakasih telah menerima penulis dengan kasih sayang layaknya seorang ayah kepada anak perempuannya, terimakasih sudah memberikan pelajaran hidup dan motivasi disetiap penulis melaksanakan bimbingan sehingga selain dapat menyelesaikan skripsi ini juga penulis memperoleh *soft skill* yang tidak bisa didapatkan dari sekolah formal.
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya, terimakasih telah menerima penulis dengan segala kekurangan layaknya seorang anak perempuannya, dan memberikan pelajaran kepada penulis untuk selalu tersenyum dan bersikap ramah kepada semua orang, dan terimakasih untuk semangat yang bapak tularkan untuk terus “bersungguh-sungguh” dalam mengerjakan sesuatu sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ismono Hadi, M.Si selaku Pembahas dan Penguji yang telah memberikan masukan, saran dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Drs. Agus Hadiawan. M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan hingga tugas terakhir.
7. Seluruh Dosen dan Staff di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pelajaran hidup untuk menggapai cita-cita penulis.
8. Seluruh Narasumber: Kasi Bidang Sumber Daya Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, Sekertaris Camat Pringsewu, Kasi Bidang PMP Kecamatan Pagelaran, Kepala Pekon Patoman, Gemahripah, Margakaya, dan Rejosari serta Sekertaris Pekon Patoman, Kaur Keuangan Pekon Gemahripah, Kepala Dusun Danau, dan juga seluruh narasumber saat melakukan pra riset yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu penulis dalam mendapatkan data baik primer maupun sekunder, semoga Allah membalas jasa Bapak dan Ibu.
9. Teristimewa untuk kedua orangtuaku, ayahanda Ahmad Dani dan Ibunda Humairoh yang selalu memberikan doa, yang selalu sabar menghadapi sifat, dan sikap penulis, terimakasih untuk seluruh kasih sayang, motivasi, doakan agar Tete bisa menjadi tiket untuk Ayah dan Mamah masuk ke *Surga Allah*, semoga Tete bisa menjadi kebanggaan Ayah dan Mamah di dunia dan di akherat, Tete selalu berusaha buat Ayah dan Mamah bangga.
10. Adikku: Dhea Khansa Nabila terimakasih untuk doa, motivasi, dukungan, dan pelajaran hidup yang adek kasih kepada tete, semoga kita bisa jadi anak yang Soleha dan selalu bisa membanggakan mamah dan ayah.

11. Teman-temanku : Lela Novianna, Tien Kemala, Vini Kartika, Puspita Aprilia, Febriana A.P, Bhogie, Fani Destia, Raudah Yunia, Kharisma Riyanti, Putri Prastiwi, Nada Rifki, Ardi Nurdianto, Clara Viony, Ginanjar, Maria, Gilang Prananda, Novia, Nur Fajar, Ilham, Irfan Pratama, Imut, Nia, Nadya, Sindy, Didi, Bima, Sonnya, Arya, Teten, Gatra, Dicky serta keluarga besar X2 dan IPS 3 terimakasih karena selalu memberikan perhatian, kasih sayang, dan motivasi kepada penulis, maaf bila penulis selalu merepotkan. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman SMAN 1 Pringsewu dan SMP N 2 Pringsewu yang selalu memiliki karakter masing-masing sehingga penulis bisa belajar banyak mengenai sifat seseorang. Terimakasih untuk teman-teman Al-Qolam dan GO Pringsewu yang sampai sekarang selalu memberikan semangat dan menjaga persaudaraan.
12. Gita Pratiwi dan Nurul Fatia terimakasih selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang dengan tulus kepada penulis, terimakasih selalu mengingatkan penulis jika penulis melakukan kesalahan. Semoga setiap langkah kalian selalu dalam Ridho-Nya, semoga kita bertemu di Surga Allah.
13. Nosi Marisa, S.IP, Shinta Silvia, Ulfa Umayasari, Miss Retno Ulandari, S.IP, Zyo, M.Wiryawan, Dhian Kur, dan Sinta PP terimakasih kalian yang telah menjadi bagian dari kisah hidup penulis semoga persaudaraan kita tidak berhenti sampai disini, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah penulis dalam menjalani hari-hari diperkuliahan sampai terselesaikan tugas akhir ini.

14. Aziza Novirania, S.IP, Iranda Putri S.IP, M. Ikhsan, S.IP, Vina, Ana, Bella, Mike, Debby, Ashfira Novthya, S.IP, Panji, Ade, Depoy, Abu, Nyunyun, Ujang, Dhean, Bagus, Dhian Safitri, Asty, Rahmita, Meri, Elyta, Mirani, Ani, Silvi, Sandi, Yudi, Nurcahyo, Sita, Mirani, Priska, Ulfa Putri, Tiara, Nces, Tika Wuri, Theo, Gerry, Andri, Aldin, Sandi, Komang dan seluruh mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2014 baik kelas ganjil maupun kelas genap terimakasih atas waktu, doa, dan bantuannya selama ini maaf tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.
15. Abang dan Mbak Angkatan 2012 dan 2013 terimakasih telah memberikan warna dan cerita di dalam hidup penulis, terkhusus untuk Mba Restiani Damayanti, S.IP terimakasih meskipun baru kenal sejak semester 3 tetapi mbak perhatian sekali, selalu menjadi guruku baik ilmu akherat maupun dunia semoga semua ilmu yang diberikan kepada saya bisa menjadi amal jariyah Mbak Res, terimakasih juga untuk Mba Winda Dwi Astutiherman, S.IP, Mbak Vivi Alvionita, S.IP, Mba Ken Sindy, S.IP, Mbak Fina Tia Risa, S.IP, dan Mbak Nadia Maudyna, S.IP semoga selalu dimudahkan dalam menggapai tujuan hidup mbak.
16. KKN Gaya Baru IV: Ibu, Bapak, Patrick, Dek Cinta, Atiyya Nur Fadhila, S.Si, Ayu Kurnia, Kholifah Nawang Wulang, S.Ked, Nopa, Aria Alim Wijaya, S.H, dan Madon terimakasih karena sudah menerima penulis menjadi keluarga baru, terimakasih untuk pelajaran, pengalaman dan kenangan yang diberikan semoga dapat menjadi keluarga selalu.

17. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu dan sudara sehingga aku bisa menjadi kebanggaan untuk almamaterku, bangsa dan agamaku.

18. Untuk seluruh pihak yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi ada sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengamalkan ilmu pengetahuan yang telah didapatkan.

Bandar Lampung, 25 April 2018  
Penulis

**Dita Maharani**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>v</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Kemampuan .....	12
1. Kemampuan Teknis .....	15
2. Kemampuan Sosial .....	17
3. Kemampuan Konseptual .....	18
B. Tinjauan Aparatur Desa .....	20
C. Tinjauan Keuangan Desa .....	21
1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa .....	24
2. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa .....	25
D. Tinjauan Pengelolaan Keuangan Desa .....	27
E. Kerangka Pikir.....	35
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Focus Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian .....	41
D. Informan .....	42
E. Jenis Data .....	43
F. Teknik Pengumpulan Data .....	45
G. Teknik Pengolahan Data .....	54

H. Teknik Analisis Data .....	55
I. Teknik Keabsahan Data.....	58
<b>IV. GAMBARAN UMUM</b>	
A. Profil Pekon Penelitian.....	60
1. Pekon Gemahripah .....	60
2. Pekon Patoman .....	69
3. Pekon Margakaya .....	77
4. Pekon Rejosari .....	89
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	97
1. Pekon Patoman .....	97
2. Pekon Gemahripah .....	108
3. Pekon Margakaya .....	118
4. Pekon Rejosari .....	131
5. Masalah yang sering terjadi dalam Pengelolaan dana desa ....	141
B. Pembahasan .....	146
1. Kemampuan Pekon Patoman dalam Mengelola Keuangan Desa .....	148
2. Kemampuan Pekon Gemahripah dalam Mengelelola Keuangan Desa.....	157
3. Kemampuan Pekon Margakaya dalam Mengelola Keuangan Desa .....	165
4. Kemampuan Pekon Rejosari dalam Mengelola Keuangan Desa .....	174
<b>VI. SIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Simpulan.....	202
B. Saran .....	206

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian terdahulu.....	8
2. Indikator Kemampuan.....	41
3. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Gemahripah.....	62
4. RPJM Pekon Gemahripah Tahun 2017.....	63
5. Jumlah Penduduk Patoman.....	70
6. Wilayah Dusun Pekon Patoman.....	72
7. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Patoman.....	72
8. RPJM Pekon Patoman 2017.....	73
9. Pendidikan Terakhir Aparatur Margakaya.....	78
10. RPJM Perubahan Tahun 2017 Pekon Margakaya.....	81
11. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Rejosari.....	90
12. RPJM Pekon Rejosari.....	91
13. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Patoman.....	149
14. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Gemahripah.....	158
15. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Margakaya.....	166
16. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Rejosari.....	174

17. Triangulasi .....	182
-----------------------	-----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar Kerangka Pikir .....	38
2. Sturktur Organisasi Pekon Gemahripah .....	68
3. Struktur Organisasi Pekon Patoman .....	76
4. Struktur Organisasi Pekon Margakaya .....	88
5. Struktur Organisasi Pekon Rejosari .....	95
6. Pemberdayaan Pekon Margakaya .....	123
7. Contoh Surat Undangan Koordinasi Formal .....	136

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Keuangan pekon yang memadai dapat meningkatkan kualitas pembangunan di desa baik dalam bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan aparatur, lalu tidak akan ada kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya aparatur pekon yang memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan pekon.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, disebutkan bahwa tahapan-tahapan dalam pengelolaan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, dalam kenyataannya diduga masih terdapat permasalahan.

KPK (2015: 2) mengemukakan bahwa diduga dalam pengelolaan dana desa tahap perencanaan rawan perencanaan tidak sesuai aturan 70% pembangunan dan 30% operasional. Pada tahapan pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan, dan pemerintahan rawan nepotisme, tidak transparan dan korupsi, tahap pengadaan barang atau jasa, penyerahan dan

pengelolaan dana rawan rekayasa, tidak transparan, dan korupsi. Pada tahap pertanggungjawaban rawan rekayasa laporan dan tidak transparan, tahap monitoring dan evaluasi rawan mendeteksi adanya korupsi.

Berdasarkan masalah yang disebutkan diatas diperlukan aparatur pekon yang memiliki kemampuan memadai, berdasarkan jurnal Aziz (1996:194) menyebutkan bahwa, pemerintah desa perlu mendapat supervisi dari pemerintah di atasnya. Hal ini dikarenakan untuk kedepannya, jumlah dana yang akan diberikan ke desa akan lebih besar sementara kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan desa masih belum cukup memadai.

Dugaan masih belum memadainya kemampuan sumber daya manusia yang ada di pekon dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat pendidikan aparatur pekon sehingga sulit memahami dan mengerti prosedur pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maupun Surat Pertanggungjawaban (SPJ) terutama dalam pengelolaan dana desa, hal ini dibuktikan berdasarkan pernyataan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pringsewu Joko Nugroho pada berita *online* sebagai berikut;

“Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pekon yang dianggap menjadi sulitnya memahami segala aturan dalam penggunaan dana desa itu sendiri. "Kepala pekon itu yang (pendidikannya) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) itu belum tentu. Masih banyak yang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Ia pun berharap kepada pihak Inspektorat ketika terjadi hal-hal karena secara administratif tidak dipahami oleh aparatur pekon untuk dapat melakukan pembinaan”

(Sumber <http://www.saibumi.com/artikel-77862-dana-desa-pemahaman-aparatur-pekon-di-sukoharjo-pringsewu->

minim.html#ixzz4xKmjfeLl diakses tanggal 27 Agustus 2017 pukul 10:02)

Meskipun berpendidikan terakhir SLTA atau SMA tidak dapat menjamin bahwa aparatur pekon tersebut dapat mengelola keuangan pekon dengan baik dan benar. Kemampuan dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan teknis, sosial dan konseptual. Masalah yang terdapat dalam bidang teknis berkaitan dengan belum menguasainya pembuatan LPJ dan SPJ maupun sering keterlambatan dalam pengumpulan laporan,.

Diperkuat dengan data hasil prariset oleh seorang staf di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu (Dinas PMP Kabupaten Pringsewu) yaitu Febi Rahma Rinda Tanggal 29 Agustus 2017, disebutkan bahwa beberapa Pekon di Kabupaten Pringsewu masih terdapat hambatan teknis yaitu belum menguasai pembuatan SPJ dan LPJ. Hal itu dijelaskan sebagai berikut:

“Untuk pekon yang aparaturnya belum menguasai pembuatan SPJ dan LPJ di Kecamatan Pringsewu diantaranya adalah Pekon Fajar Agung Barat dan Margakaya.”

Berdasarkan hasil prariset peneliti juga menemukan beberapa masalah terkait dengan kemampuan aparatur pekon terutama dalam mengelola keuangan desa pada tahap perencanaan yang berkaitan dengan mengoperasionalkan teknologi, untuk di Pekon Patoman prariset dilakukan pada Tanggal 27 Desember 2017 Pukul 10.23, peneliti menemui Pak Risdianto di Balai Pekon Patoman, selaku sekretaris pekon mengemukakan beberapa hambatan dalam pengelolaan keuangan desa seperti berikut:

“Kesulitan teknis yang dialami oleh Pekon Patoman dalam mengelola keuangan desa yaitu dipenguasaan komputer, karena tidak semua aparatur bisa mengoperasikan komputer. Hambatan sosial yang dialami kurangnya kerjasama dikarenakan kesibukan aparatur pekon yang memiliki pekerjaan lain.”

Pekon Patoman juga pernah mengalami keterlambatan dalam pengumpulan laporan, seperti yang terdapat dalam berita *online* [www.saibumi.com](http://www.saibumi.com) yang menyebutkan bahwa terdapat 3 pekon di Pringsewu yang telat dalam mengumpulkan SPJ, dijabarkan sebagai berikut:

“Hingga Kamis 28 Januari 2016, masih terdapat 3 pekon di Kabupaten Pringsewu yang belum melaporkan Surat Pertanggungjawaban tentang laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang menggunakan dana desa Tahun 2015 lalu, yaitu Pekon Parerejo Kecamatan Gadingrejo, Pekon Gading Induk Kecamatan Gadingrejo, dan Pekon Patoman Kecamatan Paagelaran.”(<http://www.saibumi.com/artikel-72198-tiga-pekon-di-pringsewu-belum-laporkan-penggunaan-dana-desa.html#ixzz4rBbQy3kf>, diakses Tanggal 29 Agustus 2017 Pukul 16:35 WIB)

Selain Pekon Patoman, peneliti juga melakukan prariset di Pekon Gemahriyah yang dilaksanakan pada Tanggal 28 Desember 2017 Pukul 09.30 bertemu dengan Bapak Kasiman selaku Sekretaris Pekon Gemahriyah, menunjukkan hasil beberapa hambatan yang dialami dalam mengelola keuangan desa sebagai berikut:

“Hambatan yang dialami pada kemampuan teknis tidak semua aparatur bisa mengoperasikan komputer, masih ada kesalahan teknis pada saat penyusunan Buku Kas Umum (BKU).”

Selain masalah teknis tersebut juga terdapat masalah lain termuat dalam berita *online* [Harianlampung.com](http://Harianlampung.com) Edisi 28 Maret 2017 adanya masalah

pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa khususnya berkaitan dengan dana desa, yaitu ratusan warga Pekon Gemahripah Kecamatan Pagelaran mendatangi Kantor Kepala Pekon dan menuntut kepala pekon agar transparan terkait penerimaan dan pengelolaan anggaran dana desa tahun 2016 dan meminta kejelasan penggunaan dana desa karena biasanya sebelum dana turun dimusyawarahkan dengan melibatkan warga, Lembaga Penjamin Mutu, Badan Himpunan Pekon.

Berdasarkan prariset yang dilakukan di Pekon Patoman dan Pekon Gemahripah dalam mengelola keuangan desa terlihat bahwa masih terdapat hambatan dan kesulitan dikemampuan teknis, konsep, dan sosial aparatur pekon. Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri dalam mengelola dana desa. Lemahnya kualitas aparatur terutama di tingkat pemerintah desa juga diungkapkan oleh Makmur (2008:6) sebagai berikut:

“Kualitas sumber daya manusia di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat bawah, tetapi juga di lingkungan birokrasi pemerintahan mulai birokrasi pusat hingga birokrasi pemerintah desa. Rendahnya kualitas SDM birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak kepada kualitas kerja para birokrat yang rendah yang bermuara kepada kesengsaraan rakyat secara ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan ketertiban karena tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari aparat birokrasi. Rendahnya kualitas kerja birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga ke pemerintahan desa”.

Peneliti juga melakukan prariset di pekon lain, yaitu Margakaya yang dilakukan pada Tanggal 27 Desember 2017 Pukul 13.10 dengan Bapak Lasiman selaku Kepala Dusun Danau yang membantu kepala urusan

(kaur) pembangunan, Beliau mengemukakan hambatan yang dialami Pekon Margakaya adalah sebagai berikut:

“Di pekon ini saya merangkap membantu kaur pembangunan, saya yang membuat SPJ, kesulitan teknis yang dialami pada pembuatan SPJ. Untuk sosial terkadang keuangan pekon ini sangat sulit, terutama pada dana desa yang terkadang menjadi bahan untuk menjatuhkan, apalagi pekon kami sebentar lagi akan diadakan pemilihan”.

Selain ketiga pekon tersebut, peneliti juga melakukan prariset di Pekon Rejosari pada Tanggal 27 Desember 2017 Pukul 08:50 WIB bertemu dengan Sekretaris Pekon Bapak Ferly, Beliau mengemukakan beberapa permasalahan terkait dengan dana desa sebagai berikut:

“Untuk aparatur yang menguasai komputer belum 100%, yang menjadi permasalahan terkadang dana yang telat pencairannya tidak ada masalah lebih, tetapi peningkatan aparatur masih perlu dilaksanakan”.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa dari empat pekon tersebut masih ditemukan permasalahan, sehingga perlu adanya pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan aparatur pekon karena pemerintah pekon merupakan ujung tombak terdepan dalam upaya pembangunan terutama dalam mengelola keuangan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pekon dalam menjalankan tugasnya di lapangan akan berhadapan langsung dengan masyarakat, tentunya dengan kompleksitas permasalahan dan kebutuhan yang muncul pada masyarakat.

Kemampuan aparatur juga berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini dikarenakan kemampuan aparatur desa memiliki peran penting dalam pengelolaan keuangan desa

untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan ekonomi desa, sosial, budaya, pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan bidang lainnya, terlebih aparaturnantinya akan diawasi dan bersentuhan langsung dengan badan pengawas keuangan yang ditunjuk pemerintah pusat untuk mengawasi penggunaan keuangan desa serta mempertanggungjawabkannya.

Aparatur desa sebagai pelaksana pemerintah terendah, dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu menunjukkan kemampuan yang optimal sebagai abdi masyarakat dan abdi negara, rendahnya kemampuan aparat pekon dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsinya harus diperhatikan dan haruslah mendapat perhatian lebih baik dari pemerintah daerah maupun masyarakat, karena tugas yang harus dijalankan dan dilaksanakan aparat pekon sangat berat.

Perlu adanya aparat pemerintah pekon yang memiliki kemampuan memadai. Selain dilandasi kemampuan dan keterampilan yang memadai, juga harus disertai disiplin yang tinggi, sehingga dalam merealisasikan tujuan-tujuan nasional dapat sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan pemerintah terlebih dalam pengelolaan keuangan desa.

Mengelola keuangan desa merupakan hal yang tidak mudah, dikarenakan keuangan desa tersebut anggarannya cukup besar dan merupakan salah satu komponen yang bisa mewujudkan pembangunan nasional. Pesatnya pembangunan nasional dalam segala bidang di era reformasi ini menuntut perlunya aparaturnya yang handal, artinya tenaga kerja yang dapat

meneruskan kesinambungan pembangunan nasional melalui peningkatan kemampuan aparatur yang ada secara profesional. Profesionalisme membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan, moralitas yang baik, loyalitas terjamin dan mempunyai disiplin kerja yang tinggi.

Pemerintah pekon harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas aparatur disegala bidang karena peran aparatur diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam mengelola keuangan desa, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai wujud menciptakan *good governance*. Kualitas dapat tercapai bila aparatur juga memiliki kemampuan, seperti kemampuan teknis, sosial dan konseptual.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan salah satu acuan peneliti dalam mengerjakan dijelaskan dalam tabel dibawah ini;

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Tahun
1.	Ulma Islami	Kapasitas Aparatur Desa Dalam Tertib Administrasi Desa (Studi Kasus di Desa Tiuh Tohou Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang)	2016
2.	Randy Aristia	Studi Tentang Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu	2015
3.	Radiana Eka	Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang	2016

diolah oleh peneliti 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa terdapat perbedaan diantaranya pada penelitian Ulma Islami yang menjadi fokus penelitian adalah

bagaimana kapasitas aparatur pekon dalam tertib administrasi dengan indikator pengukuran menggunakan teori dari Morgan yaitu kapasitas dapat diukur melalui pemahaman, keterampilan dan kemampuan, penelitian.

Penelitian Randy Aristia berfokus untuk mengetahui dan menggambarkan kemampuan aparatur pekon dalam pelayanan administrasi kependudukan dan untuk mengetahui faktor penghambat kemampuan aparatur desa di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, pelayanan administrasi kependudukan diukur dengan tingkatan pengetahuan menurut Notoatmodjo dalam domain kognitif yaitu, mengetahui, memahami dan juga mengidentifikasi tipe-tipe dasar keterampilan, yaitu keterampilan teknik, administratif, hubungan manusia, konseptual, dan diagnostik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Radiana Eka berfokus pada kemampuan pemerintahan desa mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga tahap pertanggungjawaban keuangan yang diukur menggunakan aspek-aspek kemampuan yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui asas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran di Kecamatan Buntu Batu.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan yaitu pada penelitian terdahulu berfokus pada kemampuan aparatur desa dalam

pengelolaan administrasi desa dan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan ADD. Sedangkan penelitian ini berfokus pada mengapa kemampuan Aparatur Pekon Gemahripah, Patoman, Rejosari dan Margakaya dalam pengelolaan keuangan desa rendah, teori yang dipakai dalam penelitian ini juga berbeda, yaitu menggunakan teori dari Blanchard dan Hersey 1995:5-6 dalam Makmur (2008: 66) menyatakan bahwa paling tidak terdapat tiga bidang kemampuan yang diperlukan, yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual.

Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan bahwa penelitian mengenai kemampuan aparatur desa dalam mengelola keuangan desa belum ada, khususnya di Universitas Lampung, dan keuangan desa sendiri merupakan sesuatu yang penting sehingga dalam mengelolanya membutuhkan aparatur yang memiliki kemampuan lebih, oleh karena itu persoalan ini menarik untuk diteliti.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas peneliti merumuskan masalah sebagai berikut  
“Mengapa kemampuan aparatur Pekon Patoman dan Pekon Gemahripah Kecamatan Pagelaran serta Pekon Margakaya dan Pekon Rejosari Kecamatan Pringsewu dalam pengelolaan keuangan desa rendah?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan kemampuan aparatur pekon yang terapat di Kecamatan Pagelaran dan Pringsewu khususnya di Pekon Patoman, Gemahripah, Rejosari dan Margakaya dalam pengelolaan keuangan desa rendah.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini didapatkan beberapa kegunaan diantaranya:

#### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan maupun kajian keilmuan dalam studi Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kemampuan aparatur pekon dalam pengelolaan keuangan desa.

#### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi aparatur pekon yang terdapat di Kabupaten Pringsewu khususnya yang berada di Kecamatan Pringsewu dan Kecamatan Pagelaran yaitu pada Pekon Rejosari dan Margakaya, serta Pekon Gemahripah dan Patoman dalam mengelola keuangan desa, dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu sehingga dapat meningkatkan kualitas aparatur pekon dalam mengelola keuangan desa.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Kemampuan

Individu dituntut memiliki kemampuan dalam segala bidang, hal itu bertujuan agar pekerjaan yang dilakukan akan lebih mudah diselesaikan dan akan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sesuai dengan pendapat Robbins dalam Makmur (2008:63) menjelaskan bahwa kemampuan atau *ability* merupakan suatu kapasitas individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Pekerjaan mendapatkan hasil yang baik apabila pada awalnya didahului dengan perencanaan karena kita bisa meramalkan apa yang akan terjadi, selaras dengan pendapat Ndraha dalam Makmur (2008:65) bahwa kemampuan dalam melaksanakan tugas merupakan kemampuan untuk mencapai keluaran yang telah ditetapkan atau hasil yang hendak dicapai, kemampuan tersebut meliputi kemampuan merencanakan usaha mencapai tujuan yaitu kemampuan menggali, menggerakkan, dan mengkombinasikan masukan dari lingkungan dan menyikapinya bagi sistem pelaksanaan tugas.

Kemampuan yang dimiliki setiap orang harus diasah dengan berbagai macam kegiatan, hal itu sesuai yang terdapat dalam Thoha (2015:154) yang mengemukakan bahwa kemampuan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan dari pendidikan, latihan dan pengetahuan seseorang. Kemampuan tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas untuk mencapai hasil yang maksimal.

Kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat mengerjakan tugas atau pekerjaan ada beberapa dan menurut Blanchard dan Hersey dalam Makmur (2008:66) ada tiga bidang yang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual. Kemampuan yang dimiliki seseorang sangat penting diketahui untuk memahami mengapa seseorang berbuat dan berperilaku berbeda satu dengan yang lain, seperti yang terdapat dalam Thoha (2015:37) yaitu kemampuan dapat memprediksi pelaksanaan dan hasil kerja seseorang yang bekerjasama didalam suatu organisasi tertentu.

Berdasarkan pemaparan diatas, setiap pimpinan atau atasan harus memastikan bahwa setiap aparatur perlu dilengkapi juga dengan moralitas, pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman. Itu semua membutuhkan pelatihan yang sistematis dan direncanakan sedemikian rupa sehingga dapat melaksanakan tugas fungsi dan kewajiban sesuai dengan yang diamanatkan karena menurut Robbins dalam Makmur (2008:63)

kemampuan seseorang pada hakikatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Kemampuan yang dimiliki seseorang harus selalu ditingkatkan, di*upgrade*, dan dikembangkan agar semakin banyak kelebihan yang dimiliki, maka dari itu diperlukan peran masyarakat dan orang lain untuk membantu seseorang mengembangkan kemampuannya, selaras dengan pendapat Semiawan (1999:9) pengembangan kemampuan manusia atau *human capacity development* merupakan hasil interaksi antar individu dan masyarakat yang memiliki peluang berpartisipasi karena mewakili perangkat masukan (*input*) yang menumbuh kembangkan kemampuan manusia.

Kondisi akan terus berubah oleh karena itu diperlukan bukan hanya pemahaman, tetapi juga tindakan dan pengaplikasian, dalam Semiawan (1999:10) ciri dari manusia yang ingin mengembangkan kemampuannya adalah fleksibilitas, keterbukaan, berfikir kreatif, berfikir kritis, ketangkasan yang bersifat kompleks namun cermat, yang terkait dengan media informasi yang semakin canggih kepekaan dan kemampuan mengidentifikasi dan mengatasi masalah serta kemampuan kerja sama antar manusia.

Menurut Semiawan (1999:12) pengembangan manusia ada dua pendekatan yang saling melengkapi, yaitu pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan kemampuan manusia. Pengembangan sumber daya

manusia atau *Human Resource Development Human Resource Development* berfokus pada keterampilan sikap dan kemampuan produktif ketenagakerjaan sehingga memperlakukan manusia sebagai sumber untuk dimanfaatkan yaitu sebagai objek dalam mencapai tujuan terutama dalam jangka pendek. *Human Capacity Development* atau pengembangan kemampuan manusia menunjuk pada konstelasi keterampilan, sikap dan perilaku dalam melangsungkan hidup mencapai kemandirian.

Berdasarkan penjabaran diatas disimpulkan bahwa, *human capacity development* merupakan hasil dari interaksi antara individu dimasyarakat yang dapat menumbuhkan kemampuan, selain itu juga perlu adanya keterampilan sikap dan perilaku untuk hidup di dunia yang semakin dinamis dengan begitu kemampuan seseorang akan selalu bertambah sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, dalam penelitian ini ada tiga macam jenis kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk mempermudah mengerjakan tugasnya yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial, dan kemampuan konseptual.

### **1. Kemampuan Teknis**

Salah satu kemampuan yang diperlukan seseorang agar mempermudah menyelesaikan tugas yang sedang dikerjakannya adalah kemampuan teknis, Blanchard dan Hersey dalam Makmur (2008:66) disebutkan bahwa kemampuan teknis merupakan kemampuan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, metode, dan peralatan yang diperlukan

dalam melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan, dan *training*.

Senada dengan Blanchard dan Hersey yang berkaitan dengan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seseorang, Yulk dalam Adrianto (2011:293) menyatakan bahwa keterampilan teknis merupakan pengetahuan mengenai proses, dan teknik untuk melakukan sebuah kegiatan khusus dan kemampuan untuk menggunakan alat-alat yang relevan bagi kegiatan tersebut. Aparatur memerlukan pengetahuan yang ekstensif mengenai teknik dan peralatan yang digunakan dalam melaksanakan tugas tersebut.

Pendapat lain menurut Robert L Katz dalam Moenir (2008:89) *technical skills* merupakan kompetensi spesifik untuk melaksanakan tugas atau kemampuan menggunakan alat-alat, dan pengetahuan tentang lapangan yang dispesialisasi secara benar dan tepat dalam pelaksanaan tugasnya. *Technical skill* yang dimiliki seseorang harus selalu diasah karena setiap orang harus memiliki daya saing yang tinggi dan daya tahan terhadap gejolak dunia.

Pengetahuan yang mendalam diperlukan mengenai keterampilan yang dimiliki seseorang karena memungkinkan para pegawai bekerja dengan baik, karena tuntutan masyarakat terus meningkat karena meningkatnya kesadaran akan hak. Pendapat Siagian (2005:162) mengemukakan bahwa profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pemaparan di atas disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan teknis adalah penguasaan pengetahuan maupun peralatan yang akan mempermudah pekerjaannya dalam mengelola keuangan desa, selain kemampuan teknis juga terdapat kemampuan social dan kemampuan konseptual.

## **2. Kemampuan Sosial**

Kemampuan sosial juga diperlukan seseorang dalam suatu pekerjaan, kemampuan sosial seseorang berkaitan erat dengan kenyamanan dan kondisi batin seseorang di tempat kerjanya, karena jika seseorang tersebut memiliki hubungan yang tidak baik dengan atasan maupun teman kantor bisa menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja, mempengaruhi kerjasama yang akan terjalin ketika sedang bekerja.

Kemampuan sosial yang dimiliki oleh seseorang dapat diamati melalui perilaku sosialnya, orang yang memiliki kemampuan sosial dapat memberikan kesan yang baik, dapat menciptakan perasaan positif dalam diri dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kemampuan ini merupakan kemampuan antarpribadi yang erat kaitannya dengan komunikasi. Luthan dalam Adrianto (2011:294) menyatakan bahwa kesalahan komunikasi tidak hanya akan menciptakan stress tetapi juga mengurangi produktivitas, melemahkan kualitas, dan mengarahkan kepada kemarahan. Sebaliknya komunikasi yang baik akan memberikan dorongan pada individu dan akan mencapai kepuasan kerja.

Sejalan dengan pemikiran Robert L Katz dalam Moenir (2008:90) yang menyebutkan bahwa kemampuan hubungan manusia merupakan kemampuan untuk memahami dan memotivasi orang lain, sebagai individu atau dalam kelompok kemampuan ini berhubungan dengan kemampuan menyeleksi pegawai, menciptakan dan membina hubungan yang baik, memahami orang lain, memberi motivasi dan bimbingan, dan mempengaruhi para pekerja, baik secara individual atau kelompok.

Menurut Blanchard dan Hersey dalam Makmur (2008:66) menyebutkan bahwa kemampuan sosial (*human skill*) adalah kemampuan bekerjasama dengan orang lain. Sehingga berdasarkan penjabaran di atas, kemampuan sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan aparatur dalam menjaga komunikasi dan kemampuan dalam mempengaruhi aparatur lain, dan dapat menyelesaikan masalah terkait dengan pengelolaan keuangan desa, selain kemampuan teknis dan sosial terdapat juga kemampuan konseptual.

### **3. Kemampuan Konseptual**

Blanchard dan Hersey dalam Makmur (2008:66) kemampuan konseptual yaitu kemampuan memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang gerak unit kerja masing-masing ke dalam bidang operasi organisasi secara menyeluruh, yang berarti bagaimana aparatur dapat menyesuaikan diri oleh lingkungan setempat, tekanan sosial dan

memahami serta menyeimbangkan aneka persoalan dan pandangan yang rumit. Kemampuan konseptual juga merupakan kemampuan memecahkan masalah, Swiderski dalam Adrianto (2011:294) menyatakan bahwa kemampuan konseptual merupakan kemampuan analisis, daya berpendapat dan proses berpikir logis.

Robert L Katz dalam Moenir (2008:90) kemampuan konseptual merupakan kemampuan mengkoordinasi dan mengintegrasikan semua kepentingan-kepentingan dan aktifitas-aktifitas organisasi atau kemampuan mental, menganalisa dan interpretasi informasi yang diterima dari berbagai sumber, mencakup kemampuan melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan, memahami bagaimana hubungan antarunit atau bagian secara keseluruhan, memahami bagaimana bagian-bagian tergantung pada yang lain, dan mengantisipasi bagaimana suatu perubahan dalam tiap bagian akan mempengaruhi keseluruhan kemampuan.

Berdasarkan penjabaran di atas yang dimaksud dengan kemampuan konseptual dalam penelitian ini adalah kemampuan aparatur dalam menentukan skala prioritas penggunaan keuangan desa dan juga mampu dalam membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB).

## **B. Tinjauan Aparatur Desa**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dijelaskan bahwa aparatur merupakan perangkat, alat (negara pemerintah) terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang memiliki tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. Adanya aparatur maka pelayanan publik akan terselenggara dengan baik, dan dapat membantu segala urusan dan masalah yang ada di masyarakat, terlebih masyarakat pekon yang sangat membutuhkan rangkulan dari pemerintah daerah atau yang lebih tinggi dalam menjalankan tugas fungsinya sebagai penyelenggara pemerintahan terendah.

W.J.S. Poerwadarminta dalam Kansil (1988:194) yang disebut sebagai desa adalah istilah sastra lama yang berarti tempat, tanah, atau daerah, menurut Kartohadikoesoemo dalam Kansil (1988:194) menjelaskan bahwa desa merupakan suatu daerah kesatuan hukum, dimana tempat tinggal suatu masyarakat, yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri, tidak semua daerah di Indonesia menggunakan istilah desa untuk wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat.

Desa memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dengan begitu diharapkan bisa melakukan pembangunan yang lebih baik dari segala aspek, maka dari itu setiap desa harus mempunyai sumber pendapatan dan kekayaan desa, hal itu sependapat dengan Widjaja (1996:187) yang mengemukakan bahwa dengan sumber kekayaan dan

pendapatan desa yang dimiliki, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam arti dapat membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desanya dengan kemampuan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan pekon yang tersedia.

### **C. Tinjauan Keuangan Desa**

Menteri Keuangan (2017:48) Keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Peran keuangan desa salah satunya adalah faktor yang mempengaruhi bahkan yang menentukan berhasil atau gagalnya kegiatan pemerintah pekon adalah keuangan pekon dan untuk mengelolanya tersebut dibutuhkan aparatur pekon yang kompeten, seperti yang dijelaskan oleh Surianingrat, (1985:117) banyak kegiatan di desa seperti pembangunan jalan dan jembatan yang memaksa desa memiliki aparatur desa yang terampil dan cekatan, mengenai bagaimana melaksanakan tugas desa untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh pekon. Pendapatan desa sesuai Pasal 72 Undang-Undang Tentang Desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa);

3. Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota;
4. Alokasi Dana Desa;
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah

Pendapatan desa tersebut jika diklasifikasikan menurut kelompok yang terdapat dalam Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015: 46-51) terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa (PADesa) yaitu kelompok PADesa terdiri atas jenis: hasil usaha misalnya hasil Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), tanah kas desa, hasil aset, misalnya tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi. Swadaya, partisipasi dan gotong royong misalnya adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga dan barang yang dinilai dengan uang. dan lain-lain pendapatan asli desa, antara lain hasil pungutan desa.
2. Transfer yaitu terdiri dari;
  - a. Dana Desa, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun.
  - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah, Pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada desa paling sedikit 10% dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota.  
Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota, berdasarkan ketentuan 60% dibagi secara merata kepada seluruh desa, 40% dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.
  - c. Alokasi Dana Desa (ADD), pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus. Tata Cara pengalokasian ADD ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Pengalokasian ADD kepada setiap desanya mempertimbangkan: kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Penyaluran ADD ke desa dilakukan secara bertahap.

- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi, Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten/kota kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APBD desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.
- e. Pendapatan lain-lain yang sah yaitu kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

Keuangan pekon yang bersumber dari beberapa pendapatan diatas haruslah dioleh dengan baik dan bijaksana. Perlu ketelitian, kecermatan dan aparatur yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan pekon tersebut, agar ada kepastian bahwa pengeluaran yang direncanakan dapat dibiayai dan penerimaan yang diharapkan dapat direalisasi, sewaktu-waktu perlu diadakan pengawasan perlu adanya perencanaan dan penggolongan anggaran seperti pendapat dari Surianingrat (1985:122) bahwa penggolongan anggaran diperlukan untuk mempermudah penyusunan, pelaksanaan, pengawasan maupun pertanggung jawaban anggaran.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa keuangan desa diperoleh dari beberapa sumber diantaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD); Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) , bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, lain-lain pendapatan desa yang sah yang dapat membangun desa menjadi lebih baik dan lebih mandiri dalam melayani masyarakatnya.

### **1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa diperlukan beberapa asas dimulai dari akuntabel, transparan, partisipatif dan tertib sehingga masyarakat dapat turut serta menilai dan memberikan aspirasi mereka kepada aparatur pekon dalam mengelola keuangan desanya sehingga tidak ada penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa dan terhindar dari fitnah.

## **2. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa**

Mengelola keuangan desa merupakan hal sulit yang tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tetapi perlu adanya koordinasi antara satu dengan yang lain sehingga terjalin kerjasama demi mencapai tujuan, seperti yang terdapat dalam buku BPKP (2015: 36-37) dijelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa. Namun, dalam pelaksanaannya pengelolaannya dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), dalam siklus pengelolaan keuangan pekon, tanggung jawab dan tugas dari kepala pekon dan PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara desa, yang dapat dijabarkan sebagai berikut;

- a. Kepala desa, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan:
  1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
  2. Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
  3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
  4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APB Pekon)

5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBPekon. kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan pekon, kepala pekon menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat pekon.
- b. Sekretaris desa, sekretaris desa selaku Koordinator PTPKD membantu kepala pekon dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas;
  1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon (APBP);
  2. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBP, perubahan APBP dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBP;
  3. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBP;
  4. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;
  5. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa (SPP). Sekretaris pekon mendapatkan pelimpahan kewenangan dari kepala pekon dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala pekon.
- c. Kepala Seksi, kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 PP Nomor 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala Seksi mempunyai tugas;
  1. Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
  2. Melaksanakan kegiatan dan/ bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Pekon;
  3. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
  4. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan;
  5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala pekon;
  6. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Bendahara desa, merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBP. Penatausahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. penata usahaan yang dilakukan antara lain meliputi yaitu:

1. Menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar;
2. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya;
3. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib;
4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa membutuhkan kerjasama sehingga dalam pengelolaan keuangan desa hasil yang diperoleh akan lebih baik karena tiap-tiap aparatur desa memiliki tugas dan fungsinya masing-masing yang bisa mempermudah menyelesaikan tujuan dari masing-masing desa.

#### **D. Tinjauan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengelolaan keuangan desa menurut Kementerian Keuangan (2017:48) merupakan keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan; pelaksanaan, penatausahaan; pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pekon, setiap tahapan pengelolaan keuangan desa tersebut memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan. Setiap tahapan tersebut memiliki arti sebagai berikut:

##### **1. Perencanaan**

Yahya (2006: 33-34) tahapan perencanaan dimulai dari menetapkan tujuan, merumuskan keadaan saat ini, mengidentifikasi kemudahan maupun hambatan, dan mengembangkan rencana. Perencanaan diperlukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan

dalam pembuatan keputusan, dan meningkatkan kesuksesan pencapaian tujuan organisasi.

Teori dari Terry dalam Yahya (2006: 16) mendeskripsikan bahwa fungsi perencanaan adalah menetapkan, mendeskripsikan dan menjelaskan tujuan, memperkirakan, menetapkan syarat dan dugaan tentang kinerja, menetapkan dan menjelaskan tugas untuk mencapai tujuan, menetapkan rencana penyelesaian, menetapkan kebijaksanaan, merencanakan standar-standar dan metode penyelesaian, dan mengetahui permasalahan yang akan datang dan yang mungkin akan terjadi.

Merencanakan juga identik dengan pengambilan keputusan terhadap risiko apa yang akan dihadapi sehingga kita akan lebih mudah meminimalisir kesalahan atau risiko yang akan terjadi. Hal ini selaras dengan pendapat dari Siagian (2009: 70-71) yang mengemukakan bahwa merencanakan berarti mengambil keputusan, keputusan tersebut akan dilaksanakan dimasa depan, untuk meminimalisasi risiko yang akan dihadapi, perencanaan yang tepat akan mempermudah pelaksanaan berbagai kegiatan yang efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan.

Kaitannya dengan perencanaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa
- (2) Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) tahun berkenaan.
- (3) Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa.
- (4) Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat Bulan Oktober tahun berjalan.

## 2. Pelaksanaan

Widiyono (2013:39-41) yang menyatakan bahwa fungsi pengorganisasian merupakan proses menggabungkan berbagai sumber daya manusia melalui struktur formal tugas dan kewenangan, seperti dalam pengaturan kerja, pembagian tugas, dan mengkoordinir agar implementasi perencanaan dapat terlaksana dan menghasilkan orang-orang yang berkerja bersama untuk mencapai tujuan.

Deskripsi fungsi pengorganisasian menurut Terry dalam Yahya (2006:16) adalah mendeskripsikan pekerjaan dalam tugas pelaksanaan, mengklasifikasikan tugas pelaksanaan dalam pekerjaan operasional, mengumpulkan pekerjaan operasional dalam kesatuan yang berhubungan dan dapat dikelola, menetapkan syarat pekerjaan, mengkaji dan menetapkan individu pada pekerjaan yang tepat, mendelegasikan otoritas yang tepat kepada masing-masing manajemen, memberikan fasilitas ketenagakerjaan dan sumber daya lainnya, dan menyesuaikan organisasi ditinjau dari sudut hasil pengendalian.

Langkah-langkah dalam proses pengorganisasian dalam Widiyono (2013:39-41) adalah menentukan aktivitas kerja khusus yang diperlukan untuk mengimplementasikan rencana dan mencapai tujuan, mengelompokkan aktivitas kerja kedalam pola logis atau struktur, menyerahkan aktivitas ke posisi dan orang yang spesifik serta mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengkoordinasikan aktivitas dari kelompok atau individu yang berbeda dan mengevaluasi hasil dari proses pengorganisasian.

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan hal ini sesuai dengan pendapat Widiyono (2013:39-41) yang mengemukakan bahwa departementalisasi merupakan proses pembagian aktivitas pekerjaan dalam organisasi menjadi beberapa unit yang membuat para aparatur memiliki spesialis dalam pekerjaan tertentu untuk mencapai kinerja yang efisien.

Kaitannya pengorganisasian dengan pengelolaan keuangan desa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 27 sampai dengan Pasal 31 adalah:

Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh sekretaris desa dan di sahkan oleh kepala desa.

- (3) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa.

#### Pasal 28

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima

#### Pasal 29

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) terdiri atas:
- a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
  - c. Lampiran bukti transaksi

#### Pasal 30

- (1) Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Sekretaris Desa berkewajiban untuk:
- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana kegiatan;
  - b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Berdasarkan SPP yang telah di verifikasi sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- (3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana pada ayat (2) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.

#### Pasal 31

Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3. Penatausahaan

Saiman (2002: 17) tata usaha merupakan kegiatan pencatatan dan penyusunan berbagai macam keterangan. Tujuannya agar keterangan-keterangan tersebut bisa dipergunakan secara langsung sebagai bahan atau sumber informasi bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 35 adalah:

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa.
- (2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

#### 4. Pelaporan

Pelaporan merupakan tahap pengelolaan keempat menurut Quible dalam Sukoco (2007: 177) secara sederhana laporan merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan atas pemberian kepercayaan dalam melaksanakan tanggungjawab dan pelimpahan wewenang untuk mendukung pelaksanaan tanggungjawab tersebut.

Ada beberapa syarat kualitas yang harus dipenuhi sebuah laporan menurut Sukoco (2007: 178-179) yaitu:

- a. Kecermatan  
Laporan merupakan salah satu bahan yang akan digunakan oleh seorang pimpinan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan operasi perusahaan yang menjadi wewenangnya. Oleh karena itu, sebuah laporan harus cermat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
- b. Ketepatan waktu  
Faktor waktu merupakan salah satu faktor penting dalam pengambil keputusan, apabila penulisan laporan tidak selesai pada saat yang dibutuhkan maka nilai sebuah laporan akan merosot sebanding dengan derajat kepentingan laporan.
- c. Kecukupan

Faktor ini berkaitan dengan cakupan masalah yang akan disajikan dalam laporan. Apabila cakupan masalah kurang mencukupi, pemecahan masalah yang akan diambil tidak akan tepat.

d. Kesederhanaan

Laporan juga harus dapat menyerahkan permasalahan dan pemecahannya dalam bahasa yang lebih mudah dimengerti dan mengurangi penggunaan istilah teknis apabila dipandang kurang relevan dan lebih menonjolkan pemahaman yang akan diperoleh.

e. Kejelasan

Penggunaan bahasa yang jelas dan tepat harus dilakukan.

Menurut Adisasmita (2011:95) penyusunan laporan harus mengikuti prinsip seperti jujur, objektif, dan transparan. Beberapa ciri laporan yang baik yaitu relevan tepat waktu, dapat dipercaya atau diandalkan, mudah dimengerti serta jelas dan cermat, tegas dan menarik, tidak kontradiktif, lengkap, netral, padal, terstandarisasi dan menarik.

Kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 37 adalah:

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

5. Pertanggungjawaban

Menurut KBBI memiliki arti perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggung jawab atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan uraian

pertanggungjawaban keuangan dititikberatkan kepada perolehan dan penggunaan dana, pertanggungjawaban sumber daya manusia dititikberatkan pada penggunaan dan pembinaan dalam hubungannya dengan peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat dan peningkatan kualitas pada masyarakat. Menurut Adisasmita (2011: 95-96) uraian mengenai pertanggungjawaban penggunaan sarana dan prasarana dititik beratkan pada pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan.

Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 adalah:

#### Pasal 28

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  - a. Format laporan leprtanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan;
  - b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

#### Pasal 39

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

#### Pasal 40

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan

38 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

**Pasal 41**

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain.
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

**Pasal 42**

Format rancangan peraturan desa tentang APBDesa, buku pembantu kas kegiatan, rencana anggaran biaya dan surat permintaan pembayaran serta pernyataan tanggungjawab belanja, laporan realisasi pelaksanaan APBDesa pada semester pertama dan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 27 ayat (1) dan (3), Pasal 29 huruf a dan huruf b, Pasal 37 dan Pasal 38 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Berdasarkan penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa tiap fungsi pengelolaan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain, untuk lebih jelasnya Peraturan Pemnetri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 terlampir dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat mencapai tujuan dalam mengelola keuangan desa.

## **E. Kerangka Pikir**

Mengelola keuangan desa merupakan hal sulit karena jumlah dana yang besar dan harus dilakukan oleh aparatur pekon yang memiliki kemampuan demi tercapainya pembangunan desa yang berkualitas. Pengelolaan

keuangan desa masih ditemukan masalah terutama di tahap perencanaan, dugaan pada tahap perencanaan masih terdapat ketidakterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dalam membuat rencana aparatur juga masih kesulitan dalam pembuatan RAB, tidak semua aparatur memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

Dugaan yang mempengaruhi kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan desa adalah pendidikan aparatur pekon rendah yang berdampak pada pemahaman mengenai pengelolaan keuangan pekon terutama dalam tahap pembuatan laporan diperlukan aparatur pekon yang memiliki kemampuan agar terhindar dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan oleh peneliti masih ditemukan berbagai macam masalah seperti kurang memahaminya aparatur dalam pembuatan laporan, laporan yang telat dalam mengumpulkan, kurangnya pengetahuan, aparatur pekon yang tidak ada di kantor pekon pada jam kerja sehingga kantor pekon tutup yang berdampak pada dugaan buruknya kerjasama dikarenakan kurangnya intensitas tatap muka antar aparatur, rangkap jabatan, dan aparatur yang belum menguasai pengoperasian komputer hal itu diperlukan karena sudah menggunakan siskeudes.

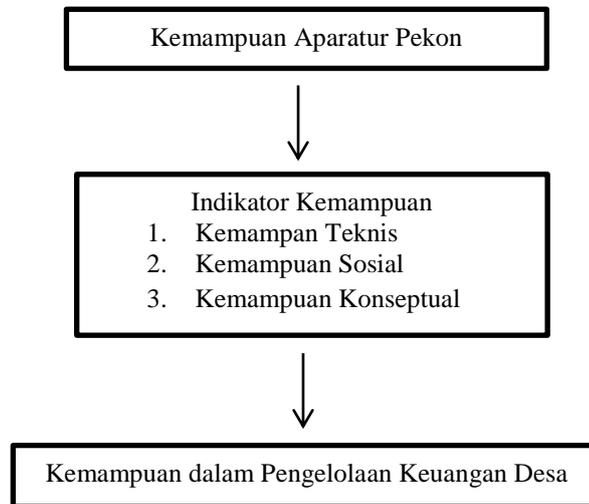
Lemahnya kualitas aparatur terutama di tingkat pemerintah desa juga diungkapkan oleh Makmur (2008 :6) sebagaimana berikut:

“Kualitas sumber daya manusia di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat bawah, tetapi juga di lingkungan birokrasi pemerintahan mulai birokrasi pusat hingga birokrasi pemerintah

desa. Rendahnya kualitas SDM birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak kepada kualitas kerja para birokrat yang rendah yang bermuara kepada kesengsaraan rakyat secara ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan ketertiban karena tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari aparat birokrasi. Rendahnya kualitas kerja birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga ke pemerintahan desa”

Berdasarkan penjabaran diatas dibutuhkan kemampuan aparatur pekon yang memadai, dan menurut Blanchard dan Hersey dalam Makmur (2008:66) setidaknya terdapat tiga bidang kemampuan yang harus dikuasai yaitu kemampuan teknis, sosial, dan konseptual. Kemampuan teknis terdiri atas pengetahuan yang dimiliki, dan dapat menggunakan peralatan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh dari pengalaman, dan pendidikan. Kemampuan sosial merupakan kemampuan dalam bekerja dengan orang lain. Kemampuan konseptual merupakan kemampuan dalam menerjemahkan pengetahuan. Sehingga dari penjabaran ketiga kemampuan tersebut peneliti dapat mengetahui mengapa terdapat kemampuan Pekon Patoman, Pekon Gemahripah, Pekon Margakaya, dan Pekon Rejosari dalam pengelolaan keuangan desa rendah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti merumuskan kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir  
Sumber: data diolah oleh peneliti 2018

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan pendekatan yang dipakai adalah kualitatif. Menurut Boglan dan Biklen dalam Ibrahim (2015:9-10) penelitian kualitatif merupakan paradigma sebagai kumpulan dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir penelitian, memandang bahwa kenyataan dibangun secara sosial, karena bersifat kompleks, saling terkait, tidak bisa diukur secara matematis, sebaliknya memerlukan pendekatan dari dalam prosesnya.

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai yang terlibat secara pribadi dalam keseluruhan proses penelitian. Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dan tipe deskriptif karena fenomena yang dikaji peneliti dalam ini memerlukan data lapangan yang sifatnya faktual dan tidak memerlukan angka.

Peneliti juga ingin melihat hubungan antar *variable* yang diteliti lebih bersifat interaktif dan saling mempengaruhi untuk bisa menafsirkan sebuah fenomena khususnya kemampuan aparatur desa dalam mengelola

keuangan desa rendah, oleh karena itu perlu adanya kajian yang mendalam, menggunakan analisis untuk menjawab mengapa kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan desa di empat pekon yaitu Pekon Patoman, Pekon Gemahripah, Pekon Rejosari dan Pekon Margakaya yang berada di dua kecamatan yaitu Pringsewu dan Pagelaran rendah.

## **B. Fokus Penelitian**

Moleong dalam Ibrahim MA (2015:31) fokus dalam penelitian kualitatif merupakan pilihan masalah yang dijadikan pusat perhatian atau sasaran orientasi kajian. Fokus yang dipilih menjadi pembatasan masalah dalam penelitian kualitatif, alasan peneliti memfokuskan penelitian adalah untuk mengetahui mengapa kemampuan aparatur pekon di Kecamatan Pringsewu dan Pagelaran Khususnya di Pekon Rejosari, Margakaya, Patoman dan Gemahripah dalam pengelolaan keuangan desa rendah.

Fokus pada penelitian ini adalah kemampuan aparatur pekon yang diukur menggunakan konsep dari Blanchard dan Hersey dalam Makmur (2008: 66) yang menyatakan bahwa paling tidak terdapat tiga bidang kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan proses manajemen, yaitu kemampuan teknis, kemampuan sosial dan kemampuan konseptual dengan indikator sebagai berikut;

**Tabel 2. Indikator Kemampuan**

No	Kemampuan	Indikator
1.	Kemampuan Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya pelatihan dan pemberdayaan guna meningkatkan kemampuan aparatur terutama dalam pengelolaan keuangan desa.</li> <li>2. Memanfaatkan teknologi yang ada guna menambah pengetahuan mengenai keuangan desa.</li> </ol>
2.	Kemampuan Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya grup <i>WhatsApp</i> atau <i>Line</i> untuk memudahkan berkomunikasi antar aparatur pekon</li> <li>2. Koordinasi dilakukan setiap minggu</li> <li>3. Pernah bekerja sama dengan pihak lain</li> <li>4. Mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan pengelolaan dana keuangan</li> </ol>
3.	Kemampuan Konseptual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu dalam pembuatan RAB dan penentuan skala prioritas</li> </ol>

Diolah oleh peneliti 2018

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang menjadi objek dalam sebuah penelitian yang menjadi sasaran guna mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Terkait dengan penelitian ini maka lokasi penelitian yang peneliti pilih adalah Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Kecamatan Pagelaran Pekon Patoman dan Gemahripah dan Kecamatan Pringsewu yaitu Pekon Rejosari dan Margakaya, selain itu juga dilakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu.

#### **D. Informan**

Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu dengan melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut, menurut Sugiyono (2014:216) penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu yang dinamakan sebagai narasumber, atau partisipan atau informan, dan guru dalam penelitian. Pertimbangan dan kriteria tertentu untuk informan dijelaskan sebagai berikut:

1. Informan merupakan subyek telah lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.
2. Informan merupakan subyek yang masih aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi sasaran perhatian peneliti.
3. Informan merupakan subyek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas terlebih dahulu.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka informan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ibu Suharti, S.E selaku Kasi Pengembangan Sumber Daya Kelurahan dan Pekon Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pringsewu;
2. Ibu Dra. Titi Puji Lestari, M.M. selaku Sekretaris Camat Pringsewu;

3. Bapak Witriyono selaku Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (PMP) Kecamatan Pagelaran;
4. Pak Sudiyo selaku Kepala Pekon Patoman;
5. Pak Maniso selaku Kepala Pekon Gemahripah;
6. Pak Abidin selaku Kepala Pekon Margakaya;
7. Pak Mispan selaku Kepala Pekon Rejosari;
8. Pak Risdianto selaku Sekretaris Pekon Patoman;
9. Pak Arip selaku Kaur Keuangan Gemahripah;
10. Pak Lasiman selaku Kepala Dusun Danau.

Alasan peneliti mengambil informan tersebut adalah informan tersebut yang bersinggungan langsung dengan objek penelitian ini, peneliti ditujukan langsung kepada orang yang ahli dalam mengelola keuangan desa di masing-masing pekon, alasan lain adalah untuk bisa mengetahui keabsahan data yang didapat. Tujuannya untuk memberikan informasi yang akurat mengenai apa yang akan diteliti dan menjamin keabsahan data.

#### **E. Jenis Data**

Data merupakan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang berupa informasi dan fakta menurut Bungin dalam Ibrahim, MA (2015: 66) data merupakan segala bentuk informasi, fakta, dan realita yang terkait atau relevan dengan apa yang dikaji atau diteliti. Data dalam penelitian diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan segala informasi, fakta dan realitas yang terkait atau relevan dengan penelitian. Peneliti menggunakan orang sebagai pemberi informasi terkait dengan objek penelitian. Dalam Penelitian ini data primer merupakan hasil wawancara dengan alasan agar peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih dalam dan menginterpretasikan situasi maupun fenomena yang terjadi langsung oleh informan.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi, fakta dan realitas yang juga terkait atau relevan dengan penelitian, namun tidak secara langsung, data ini bisa memperjelas gambaran sebuah realitas penelitian. Untuk penelitian ini data sekunder berasal dari artikel *online*, jurnal tentang penelitian terkait, berita di media baik cetak maupun *online* dan sumber resmi seperti undang-undang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dan dokumentasi yang berhubungan dengan judul penelitian ini, RPJMDes Pekon Patoman, Gemahripah, Rejosari dan Margakaya, APBPekon, dan RKP Pekon Patoman, Gemahripah, Rejosari, dan Margakaya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

### **1. Wawancara**

Menurut Moloeng dalam Ibrahim (2015:88) wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua pihak, yaitu pewawancara. Alasan peneliti menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara adalah agar peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang narasumber dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang tidak bisa didapatkan dari teknik lain, termasuk observasi. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang kompeten untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kemampuan aparatur dalam mengelola keuangan desa, sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan Ibu Suharti, S.E selaku Kasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelurahan dan Pekon Dinas Pemberdayaan dan Pemerintahan Pekon Pringsewu di Kantor Dinas PMP Pringsewu Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 11:10, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Hambatan yang dialami jika mengadakan pelatihan yang menghadiri tidak sesuai dengan yang seharusnya, sehingga

hasilnya kurang maksimal, kurang menindaklanjuti pelatihan yang diberikan, dan kurangnya rasa tanggungjawab di dalam diri aparatur pekon. Masalah yang sering terjadi kurangnya pelibatan masyarakat dan lembaga pekon dalam proses perencanaan, kesalahan administratif dalam pelaporan serta keterlambatan dalam pengumpulan laporan.

Upaya dinas dalam meningkatkan kapasitas aparatur pekon dengan memberikan pelatihan satu tahun 1 kali dan tidak diulang di tahun berikutnya. Pihak dinas juga memberikan *reward* berupa uang pembinaan, piala dan piagam kepada pekon yang menang dalam kegiatan lomba pekon.

- b. Wawancara dengan Sekretaris Camat Pringsewu Ibu Dra. Titi Puji Lestari di Kantor Kecamatan Pringsewu pada Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 13:45 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tupokasi kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa terdapat di Permendagri No. 113 Tahun 2014, secara umum tugas kecamatan sebagai koordinator, pembina dan pengawas. Fasilitas yang diberikan sosialisasi peraturan terbaru dan pembinaan. Masalah yang sering dialami adalah keterlambatan dalam pengumpulan pelaporan, penyusunan pelaporan yang kurang menguasai karena sumber daya pekon kurang maksimal. Terdapat rapat koordinasi (rakor) 1 bulan sekali. Pekon yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah Margakaya.

- c. Wawancara selanjutnya dengan Kasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Bapak Witriyono di Kantor Kecamatan Pagelaran Tanggal 30 Januari 2018 Pukul 09.15, dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tupoksi kecamatan dalam pengelolaan keuangan desa *monitoring* dan evaluasi. Fasilitas yang diberikan sosialisasi dan pembinaan. Masalah dalam pengelolaan dana desa keterlambatan dalam pengumpuln laporan, tidak semua bisa dalam mengelola keuangan desa hanya petugasnya, keterbatasan penggunaan teknologi, pencairan kurang tepat waktu. Diadakan rakor satu bulan sekali di Kecamatan Pagelaran.

- d. Wawancara dengan Pekon Patoman dilaksanakan pada Tanggal 29 Januari 2018 dengan Pak Sudiyono selaku Kepala Pekon Patoman di Balai Pekon Patoman Pukul 08.15 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Aparatur pekon jarang mengakses internet untuk mengembangkan pengetahuan mengenai keuangan desa, dalam pengumpulan laporan Pekon Patoman pernah mengalami keterlambatan, aparatur yang bisa mengoperasikan komputer terdiri dari sekretaris pekon dan kaur keuangan, pelatihan pernah diadakan terutama dari pemda.

Menjaga koordinasi diadakan rapat 3 bulan. Kepala Pekon melakukan pendekatan dan mengingatkan untuk bersama dalam

membangun, tidak ada kerjasama kepada pekon lain dalam meningkatkan kemampuan, karena bertemu saat pelatihan yang diadakan dinas. Dalam menentukan skala prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), pihak pekon tidak kesulitan dalam pembuatan RAB.

- e. Wawancara dengan Pak Risdianto selaku Sekretaris Pekon Patoman pada Tanggal 29 Januari 2018 di Balai Pekon Patoman Pukul 09.00 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Jarang mengakses internet karena lebih paham jika dijelaskan, selanjutnya pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan dengan mengumpulkan usulan dari warga pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) pekon dihadiri oleh kepala dusun, Rukun Tetangga (RT), Badan Himpunan Pekon (BHP), pendamping desa. Asas yang dipakai transparan. Pembangunan dilaksanakan oleh TPK, dalam mengumpulkan pelaporan pernah terlambat, tidak ada yang sulit dalam tahapan pengelolaan dana desa, hanya komunikasi antar aparatur dan dengan kepala pekon yang sulit. Aparatur yang bisa mengoperasikan komputer adalah sekertaris desa, kaur keuangan, kepala pekon. Untuk pelatihan aparatur dari kabupaten setiap tahun ada.

Kepala pekon kurang memberikan komunikasi tetapi sering mengingatkan tugas aparatur. Tidak ada kerjasama khusus bersama

pekon lain, tetapi terdapat Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia Kecamatan Pagelaran (FORSEKDESI) dengan adanya forum tersebut bisa membantu dalam berkoordinasi dengan pekon lain. menentukan skala prioritas penggunaan keuangan desa dengan melihat RPJMDes, dalam membuat RAB Pekon Patoman tidak mengalami kesulitan karena sekretaris pekon sendiri yang membuat RAB, namun untuk tahun 2018 yang membuat kaur keuangan.

- f. Wawancara selanjutnya oleh Pak Maniso selaku Kepala Pekon Gemahripah, wawancara dilaksanakan pada Tanggal 26 Januari 2018 Pukul 08.00 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Tidak pernah mengakses internet untuk pengetahuan keuangan desa. Tahap pengelolaan keuangan desa tahap awal perencanaan dengan diadakan musyawarah dari tingkat RT sampai ke tingkat pekon. Gemahripah memegang prinsip transparan namun tidak sembarangan dalam memberikan informasi. Dalam pelaksanaan yang membangun adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Dalam mengumpulkan laporan tidak pernah telat karena dibantu oleh operator yang bekerja di Dinas PMP, di pekon Gemahripah yang memiliki keahlian di teknologi 3 orang.

Pelatihan untuk aparatur yang dianggarkan 1 tahun 1 kali, untuk diundang oleh pihak dinas maupun pemda sering. Untuk menjaga komunikasi diadakan pertemuan setiap minggu dan terdapat rapat

koordinasi. Cara mempengaruhi aparaturnya lain dengan cara mengajak dan memberikan contoh. Terdapat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) yang biasanya membiayai pelatihan bersama. Dalam menentukan skala prioritas dengan melihat prioritas dan lingkungan sekitar, dan dalam pembuatan RAB tidak mengalami kesulitan.

- g. Wawancara selanjutnya dengan Pak Arip selaku Kaur Keuangan Pekon Gemahripan pada Tanggal 29 Januari 2018 Pukul 10:15, dengan hasil wawancara sebagai berikut, mengakses internet jika ada sosialisasi yang diberikan, di rumah kembali dicari. Proses pengelolaan keuangan desa awalnya mengadakan musyawarah pekon untuk menjangkau usulan dari tingkat RT yang dihadiri masyarakat, lembaga pekon, dan aparaturnya. Asas yang dipakai dalam mengelola dana desa adalah transparan dengan adanya *banner* di depan balai pekon. Dalam pelaksanaan menganut swakelola, tidak pernah telat dalam mengumpulkan laporan.

Kesulitan yang dialami Pekon Gemahripan pada saat perencanaan yaitu pembuatan RAB karena keterbatasan SDM, aparaturnya sebagian besar sudah bisa mengoperasikan komputer tetapi yang mengerti siskeudes hanya Pak Arip. Pemberdayaan aparaturnya dari dana desa dilakukan. Dalam menjaga komunikasi diadakan rakor 1 bulan sekali untuk yang formal, untuk yang informal dilakukan setiap minggu atau jika ditemukan masalah. Menentukan

skala prioritas sesuai dengan RPJMDes, lalu, dalam pembuatan RAB masih terdapat kesulitan.

- h. Wawancara selanjutnya dengan Pak Abidin selaku Kepala Pekon Margakaya dilakukan pada tanggal 25 Januari 2018 Pukul 08.25 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Jarang dalam mengakses internet. Tahap perencanaan diadakan musrenbang dihadiri RT, tokoh masyarakat, agama, dan adat. Dalam mengelola keuangan desa menggunakan asas transparan, dalam pelaksanaan terdapat tim khusus pembangunan, tidak pernah telat dalam mengumpulkan laporan. Paling sulit dalam mengelola keuangan desa pada penyusunan LPJ, pendamping tidak aktif.

Aparatur pekon hampir semuanya bisa mengoperasikan komputer. Diadakan pemberdayaan aparatur 1 kali. Dalam menjaga komunikasi diadakan rapat koordinasi satu bulan sekali, cara mempengaruhi aparatur dengan memberikan tip atau rangsangan. Menentukan skala prioritas dengan melihat RAB yang dibuat oleh Pak Lasiman.

- i. Wawancara dengan Pak Lasiman dilakukan pada Tanggal 27 Januari 2018 Pukul 09.00 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Jarang megakses internet berkenaan dengan keuangan desa, hanya seperlunya seperti mendownload laporan keuangan untuk dijadikan contoh. Perencanaan dimulai dari musyawarah RT yang dilanjutkan ke dusun hingga tingkat terakhir yaitu musyawarah

desa untuk membuat RKP dan menyesuaikan RPJMDes. Dalam mengelola keuangan desa menggunakan asas transparan, dan dalam pelaksanaan pembangunan terdapat TPK, tidak pernah terlambat dalam mengumpulkan laporan, hampir semua aparatur yang bisa mengoperasikan teknologi namun untuk pengelolaan daan desa hanya Pak Lasiman sehingga diperbantukan, pelatihan diadakan oleh pemda dan dinas untuk pemberdayaan dianggarkan menggunakan keuangan desa.

Menjaga komunikasi dengan adanya musyawarah atau rembuk pekon yang dilaksanakan jika dalam keadaan mendesak. Cara yang dilakukan oleh Pak Lurah dengan memberikan rangsangan seperti makan siang. Kerjasama dengan pihak lain dalam meningkatkan kemampuan terjadi ketika pemberdayaan dilaksanakan memanggil narasumber dari luar. Menentukan skala prioritas dengan menyesuaikan RPJMDes, jika mendesak dan tidak terdapat di RPJMDes dibuat RKP Daftrar Usulan (DU). Dalam pembuatan RAB tidak kesulitan.

- j. Pak Mispan selaku Kepala Pekon Rejosari, wawancara dilakukan pada tanggal 25 Januari 2018 Pukul 07.45 dengan hasil wawancara sebagai berikut:

Jarang mengakses internet, sebelum melakukan perencanaan harus menemukan masalah yang ada dimasyarakat dengan dihadiri RT, kadus, tokoh masyarakat, pemuda, dan agama dan mengajukan

usulan untuk dimasukkan ke dalam RPJMDes, lalu akan membentuk Tim 11 untuk membuat RKP. Asas yang dipakai dalam pengelolaan dana desa adalah transparan dan terbuka, dalam pelaksanaan kegiatan terdapat TPK,. Tidak ada yang sulit dalam tahapan karena memiliki aparatur yang menjalankan tupoksinya dengan benar dan sebagian besar bisa mengoperasikan komputer.

Menjaga komunikasi menggunakan *handphone*, melakukan rakor 1 bulan sekali baik formal maupun informal. Cara mempengaruhi aparatur dengan memberikan insentif dan menyadarkan. Dinamika sosial terjadi pada saat musrenbang karena semua yang memberi usulan ingin direalisasikan. Jika terdapat masalah Tim 11 yang menyelesaikannya. Dalam menentukan skala prioritas dengan merengkingkan. Pembuatan RAB juga dikerjakan oleh Tim 11.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto peneliti saat melakukan wawancara dengan berbagai narasumber, dan juga dokumen tertulis seperti Permendagri No. 113 Tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan desa dan dokumen pekon seperti RPJMDes Pekon Patoman, Gemahripah, Rejosari dan Margakaya, APB Pekon, dan RKP Pekon Patoman, Gemahripah, Rejosari, dan Margakaya berita *online* Saibumi.com diakses pada 27 Agustus 2017 pukul 10:02, dan juga *website* [djpj.depkeu.go.id](http://djpj.depkeu.go.id).

### 3. Observasi

Observasi dalam penelitian ini berkaitan dengan mencari data kemampuan sosial khususnya memberi teladan yang baik, dengan tepat waktu, kemampuan mengoperasikan komputer, komunikasi antar kepala pekon dan aparatur maupaun dengan aparatur lain, dan juga grup *WhatsApp* atau *Line* secara langsung peneliti lihat.

## G. Teknik Pengolahan Data

Ibrahim (2015:101) suatu teknik pengelolaan data memberikan penjelasan bahwa data yang telah dikumpulkan dari lapangan sebelum disajikan terlebih dahulu diolah dengan beberapa tahapan yaitu:

1. *Editing* adalah proses mengecek kebenaran data, menyesuaikan data untuk memudahkan proses seleksi data. Teknik *editing* dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menyalin ulang hasil wawancara dengan dokumen yang berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam pengelolaan dana desa, data yang dianggap tidak relevan akan dibuang, dan yang akan diproses merupakan data yang relevan dengan fokus penelitian.
2. Interpretasi data adalah memberikan interpretasi berbagai data yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Pelaksanaan interpretasi dilakukan dengan menguraikan jawaban informan dalam bentuk deskriptif. Peneliti memberikan penjabaran dari berbagai data yang melalui tahap *editing* sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah

memiliki makna akan dilakukan kegiatan analisis data berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumentasi.

## **H. Teknik Analisis Data**

Ibrahim (2015:103) analisis data dimaknai sebagai proses menyikapi data, menyusun, memilah dan mengolahnya ke dalam satu susunan yang sistematis dan bermakna. Jika data diumpamakan sebagai tumpukan informasi dan fakta yang berserakan maka proses menyusun data, mengolahnya ke dalam suatu pola atau format yang lebih teratur sehingga mudah dipahami dan dimaknai.

Patton dalam Ibrahim (2015:105) Analisis data kualitatif adalah suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, hingga proses penafsiran. Dalam konteks analisis, penafsiran dimaksud yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian, analisis data terdiri dari berbagai macam kegiatan yaitu:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses dimana seorang peneliti perlu melakukan telaah awal terhadap data-data yang telah dihasilkan, dengan cara melakukan pengujian data dalam kaitannya dengan aspek atau fokus penelitian. Reduksi data berarti pengurangan atau penentuan ulang terhadap data yang telah dihasilkan dalam penelitian.

Ibrahim (2015:109) tahap ini peneliti mencoba menyusun data lapangan, membuat rangkuman atau ringkasan, memasukkannya ke dalam klasifikasi dan kategorisasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Dari proses ini peneliti dapat memastikan data yang sesuai, terkait dan tidak sesuai dan tidak terkait. Data yang sesuai dan terkait disusun dengan sistematis, dimasukkan ke dalam kategorisasi data dan yang dipandang tidak sesuai dipisahkan.

Peneliti mewawancarai informan yaitu perwakilan Aparatur Pekon Patoman, Pekon Gemahripah, Pekon Rejosari dan Pekon Margakaya, Kasi Pengembangan Sumber Daya Kelurahan dan Pekon Dinas Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pringsewu, Kasi PMP Kecamatan Pagelaran serta Sekertaris Camat Pringsewu, untuk aparatur memiliki pertanyaan yang sama, untuk sekertaris Camat Pringsewu dan Kasi PMP juga memiliki pertanyaan yang sama, namun untuk Dinas PMP memiliki pertanyaan berbeda meskipun bersangkutan dengan keuangan desa. Dari hasil wawancara tersebut akan dikategorisasikan menjadi sejenis dan yang tidak sesuai akan dipisahkan.

## 2. Penyajian Data

Ibrahim (2015:109) penyajian data merupakan upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data yang dihasilkan secara jelas dalam bentuk gambar, grafik, bagan, dan tabel. Penyajian data bertujuan untuk memastikan data yang dihasilkan telah masuk dalam, kategori-

kategori yang sesuai sebagaimana telah ditentukan, untuk memastikan data sudah lengkap dan sudah mampu menjawab setiap kategori yang dibuat. Jika proses *display* data sudah mencapai dua tujuan itu, maka peneliti dapat melangkah pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi.

### 3. Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verifying Conclusion*)

Ibrahim (2015:111) pada tahap ini peneliti dapat melakukan konfirmasi dalam rangka mempertajam data dan memperjelas pemahaman dan tafsiran yang telah dibuat sebelum peneliti sampai pada kesimpulan akhir peneliti, karena itulah tahapan analisis dilakukan untuk menemukan kesimpulan akhir dari sebuah penelitian berdasarkan satuan kategorisasi maupun pertanyaan utama penelitian.

Artinya bahwa, proses analisis penelitian dianggap selesai ketika seluruh fakta yang telah dihasilkan dan disisipkan telah dapat memberikan jawaban yang baik dan jelas mengenai permasalahan penelitian. Jika belum mampu menjawab atau masih ada yang kurang jelas, maka peneliti harus melakukan verifikasi, bahkan kembali ke proses awal mencari data tambahan atau data lanjutan mereduksi, melakukan *display* dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan proses reduksi data, penyajian data dan mengungkapkan kesimpulan bahwa masalah yang sering ditemukan dalam pengelolaan dana desa adalah keterlambatan dalam pengumpulan laporan, dan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa meliputi kurang

berkelanjutan setelah diadakan pelatihan yang diberikan, kurang mengindahkannya perintah yang diberikan oleh dinas terkait jika terdapat pelatihan, misalnya pelatihan dalam keuangan pekon yang menghadiri adalah kaur pelayanan.

## **I. Teknik Keabsahan Data**

Keabsahan data (*trustworthiness of data*) merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian. Ada empat kriteria keabsahan data pada suatu penelitian yaitu derajat keterpecahan, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Moloeng dalam Ibrahim (2015:120). Triangulasi dalam pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara mengecek data dari berbagai sumber dan berbagai waktu, yaitu:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data melalui berbagai teknik pengumpulan data misalnya data dari sumber satu, sumber dua, sumber tiga dan sebagainya, dalam penelitian ini membandingkan hasil wawancara dari berbagai informan seperti Kepala Pekon Patoman, Rejosari, Gemahripah, dan Margakaya, Kasi Bidang Pengembangan Sumber Daya Kelurahan dan Pekon Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu, Kasi Bidang Pemberdayaan Kelurahan dan Pekon Kecamatan Pagelaran serta Sekertaris Camat Kecamatan Pringsewu.

## 2. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu adalah mengecek data melalui analisis perbedaan waktu pengumpulan data misalnya hasil wawancara pagi, siang, malam, atau hasil observasi hari pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, pada penelitian ini menggunakan hasil prariset dengan hasil riset yang peneliti lakukan.

## **IV. GAMBARAN UMUM**

### **A. Profil Pekon Penelitian**

#### 1. Pekon Gemahripah

##### a. Sejarah Pekon

Pekon Gemahripah terletak di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang pada awalnya merupakan pedukuhan yang terdiri dari lima kelompok Rukun Tetangga (RT) yang berasal dari Pulau Jawa, tepatnya Purworejo, Jawa Tengah mereka membuka hutan Tahun 1831. Pada awalnya wilayah ini diberi nama Banjarejo. Pendetang juga membuka lahan hutan menjadi lading pertanian atau perkebunan, selain itu pendatang memiliki mata pencaharian lain sebagai pedagang maka dari itu nama Bajar Rejo digantikan dengan nama Gemahripah.

Gemahripah berasal dari dua suku kata yaitu Gemah dan Aripah yang memiliki makna “penduduk pendatang yang merasa betah (kerasan) bertempat tinggal di wilayah ini dengan kemakmurannya” dengan harapan besar wilayah ini akan menjadi makmur dan maju disegala bidang.

Wilayah ini awalnya merupakan dusun dari Pekon Patoman dengan Kamituo (Kepala Dusun) pertama adalah Bapak Karto Suwito, dengan bekal pengalaman dari Pulau Jawa beliau memiliki gagasan bahwa seorang pamong atau perangkat desa masing-masing mendapat imbalan berupa tanah garapan yaitu tanah bengkok. Jadi tanah bengkok yang ada di Pekon Gemahripah merupakan tanah milik Gemahripah yang merupakan gagasan pertama yang berawal dari riwayat sejarah kepemilikan tanah Pekon.

Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambah pula wilayah tinggal masyarakat, maka Dusun Gemahripah dimekarkan menjadi Pekon Gemahripah dari Pekon Patoman berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor 5 Tahun 2004 Tanggal 12 Oktober 2005.

Secara administratif wilayah Pekon Gemahripah terdiri dari 2 Dusun dan 5 RT. Secara umum tipologi Pekon Gemahripah terdiri dari persawahan, perladangan, perkebunan, perikanan, dan industri kecil. Topografis Pekon Gemahripah secara umum termasuk daerah dataran sedang yang bergelombang, dan berdasarkan ketinggian wilayah Pekon Gemahripah berada (lebih dari 100-500m dpl).

b. Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk Pekon Gemahripah berdasarkan profil pekon sebanyak 1437 jiwa yang terdiri dari 758 laki-laki dan 679 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah petani tanaman pangan dan petani perikanan.

c. Pendidikan Terakhir Aparatur

**Tabel 3. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Gemahripah**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Maniso	Kepala Pekon	SMA
2.	Kasiman	Juru tulis	SMA
3.	Surahmat	Kaur Pemerinthan	SMP
4.	Sodik	Kaur Kesra	SMU
5.	Arip	Kaur Keuangan	SMA
6.	Agus Triman	Kaur Pembangunan	SMA
7.	Pupon	Kaur Umum	SMA

Diolah oleh peneliti 2018, sumber Profil Pekon Gemahripah

## d. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon Gemahriyah Tahun 2017

**Tabel 4. RPJM Pekon Gemahriyah Tahun 2017**

No	Bidang/ jenis kegiatan			Lokasi	Volum e	Sasaran/Manfaat	Waktu pelaksanaan	Biaya dan sumber pembiayaan		Pola pelaksanaan		
	Bidang		Jenis kegiatan					Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama antar pekon	Kerjasama pihak ketiga
a	B	c	D	E	F	G	H	I	J	K	l	m
1	Penyelenggaraan pemerintahan pekon	A	Penghasilan tetap kepala pekon dan perangkat	Gemahriyah	1 orang	Meningkatkan kesejahteraan kepala pekon		187.200.000	APBD/A DP	V		
		C	Tunjangan kepala pekon dan perangkat	Gemahriyah	1 orang	Meningkatkan kesejahteraan perangkat pekon dan kepala pekon		27.600.000	APBD/A DP	VV		
		e	Tunjangan ketua dan anggota BHP	Gemahriyah	5 orang	Meningkatkan kinerja dan motivasi BHP		20.400.000	APBD/A DP	V		
		f.	Tunjangan RT	Gemahriyah	5 orang	Meningkatkan kesejahteraan RT		27.000.000	APBD/A DP	V		
		G	Tunjangan	Gemahriyah	3	Meningkatkan		19.000.000	APBD/A	V		

		.	pengelola aset dan keuangan pekon	ah	orang	n kesejahteraan RT		DP			
		h.	Operasional perkantoran	Gemahri ah	1 kegiat an	Menunjang penyelenggar aan pemerintahan	8.9620.000	APBD/A DP	V		
		I	Operasional BHP	Gemahri ah	1 kegiat an	Meningkatka n kinerja dan motivasi BHP	1.300.000	APBD/A DP	V		
		J	Operasional LPM	Gemahri ah	1 kegiat an	Meningkatka n dan kinerja LPM	1.000.000	APBD/A DP	V		
		k.	Kegiatan operasional karang taruna	Gemahri ah	1 kegiat an	Meningkatka n kualitas dan kuantitas pemuda	1.453.000	APBD/A DP	V		
		l.	Kegiatan operasional PKK	Gemahri ah	1 kegiat an	Meningkatka n kualitas dan kuantitas PKK	1.4916000		V		
		m	Penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran (RKP dan APBP)	Gemahri ah	1 kegiat an	Perencanaan tersusun dengan baik dan sesuai	5.430.000	APBD/A DP	V		
						Jumlah bidang 1	394.919.000				
2	Pembanguna n Pekon	a.	Rehab Balai Pekon	Gemahri ah	1 Ls	Menambah kenyamanan kantor	30.492.600	APBD/A DP	V		

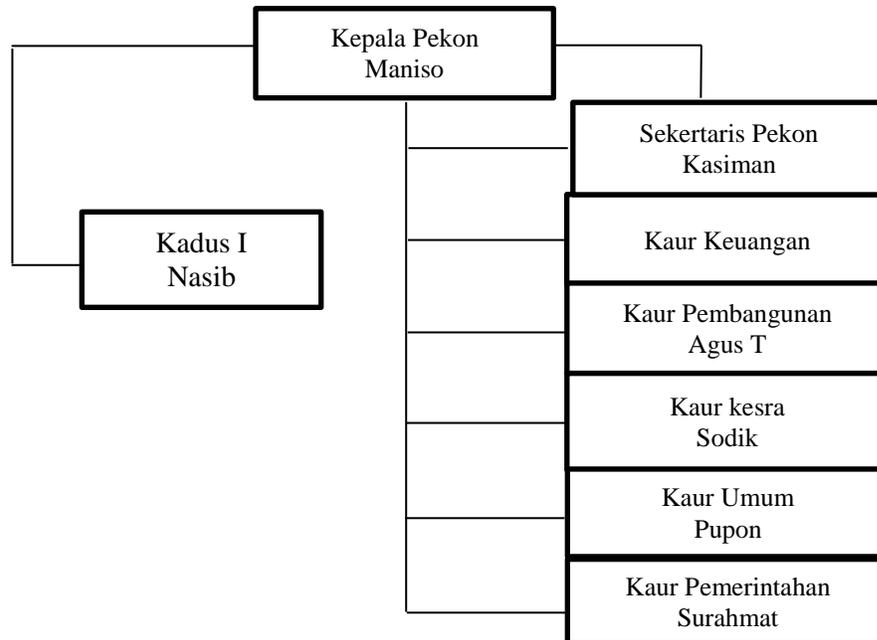
		b.	Talud penahan tanah	Gemahripan	1 Ls	Memperlanca r transportasi masyarakat		300.000.000	APBN/Da na Desa	V		
		c.	Drainase	Gemahripan	1 Ls	Melancarkan saluran air		20.000.000	APBN/Da na Desa	V		
		d.	Onderlagh	Gemahripan	1 Ls	Memperlanca r transportasi masyarakat		300.000.000	APBN/Da na Desa	V		
		e.	Pembangun an PAMSIMA S	Gemahripan	1 Ls	Menambah sumber air bersih		40.000.000	APBN/Da na Desa	V		
		f.	Gorong-gorong	Gemahripan	1 Ls	Melancarkan saluran air		80.000.000	APBN/Da na Desa	V		
						Jumlah Bidang 2		770.492.600				
3.	Pembinaan Kemasyarakan	a.	Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Gemahripan	1 kegiatan	Meningkatka n keamanan dan kenyamanan masyarakat		1.800.000	APBD/A DP	V		
		b.	Kegiatan pengemban gan keolahragaa n	Gemahripan	1 kegiatan	Meningkatka n kegiatan pemuda		20.000.000	APBD/A DP	V		
						Jumlah bidang 3		21.800.000				
4.	Pemberdayaa n Masyarakat		Kegiatan pelatihan pemerintahn pekon dan BHP	Gemahripan	1 kegiatan	Meningkatka n kapasitas pemerintah pekon dan BHP		6.000.000	APBN/Da na Desa	V		
			Pelatihan peningkatan	Gemahripan	1 kegiat	Meningkatka n kapasiatas		6.000.000	APBN/Da na Desa	V		

			kapasitas PKK		an	PKK						
			Pelatihan usaha ekonomi masyarakat	Gemahrip ah	1 kegiat an	Meningkatka n usaha ekonomi masyarakat	6.000.000	APBN/Da na Desa	V			
			Pelatihan peningkatan SDM masyarakat dibidang pertanian	Gemahrip ah	1 kegiat an	Peningkatan SDM masyarakat dibidang pertanian	6.000.000	APBN/Da na Desa	V			
			Pelatihan peningkatan SDM masyarakat dibidang perikanan	Gemahrip ah	1 kegiat an	Peningkatan SDM masyarakat dibidang perikanan	6.000.000	APBN/Da na Desa	V			
			Pelatihan peningkatan SDM masyarakat dibidang pertermaka n	Gemahrip ah	1 kegiat an	Peningkatan SDM masyarakat dibidang perternakan	6.000.000	APBN/Da na Desa	V			
			Pelatihan peningkatan SDM masyarakat dibidang perkebunan	Gemahrip ah	1 kegiat an	Peningkatan SDM masyarakat dibidang perkebunan	6.000.000	APBN/Da na Desa	V			
			Pelatihan peningkatan SDM masyarakat	Gemahrip ah	1 kegiat an	Peningkatan SDM masyarakat dibidang	6.000.000	APBN/Da na Desa	V			

			dibidang perkebunan			perkebunan						
			Pelatihan peningkatan SDM masyarakat dibidang TTG	Gemahripah	1 kegiatan	Peningkatan SDM masyarakat dibidang TTG		6.000.000	APBN/Dana Desa	V		
						Jumlah Bidang 4		54.000.00				
5.	Penyertaan Modal		BUMDes	Gemahripah	1 Ls	Meningkatkan usaha masyarakat		100.000.000	APBN/Dana Desa	V		
						Jumlah Keseluruhan		1.341.211.600				

Sumber: RPJMDes Gemahripah

## e. Struktur Organisasi Pekon Gemahripah



Gambar 2. Struktur Organisasi Pekon Gemahripah  
Diolah oleh peneliti 2018, sumber Profil Pekon Gemahripah

## 2. Pekon Patoman

### a. Sejarah pekon

Pekon Patoman pada mulanya suatu daerah hutan belantara yang dihuni oleh binatang buas dan pohon-pohon besar. Pekon Patoman mulai dirintis pembukaannya pada Tahun 1928 oleh beberapa orang pendatang dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pekon Patoman pada awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Lampung Selatan, beralih menjadi bagian dari Kecamatan Pringsewu Kabupaten Tanggamus, dan setelah adanya pemekaran maka masuk menjadi bagian dari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Tanggamus.

Pekon Patoman merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Pekon Patoman terdiri empat dusun dan terbagi menjadi 16 RT. Pekon Patoman mempunyai ciri khas tersendiri karena dipengaruhi oleh berbagai aspek geografi dan etnis. Penduduk Pekon Patoman terdiri dari beberapa suku, yang sebagian sebagian besar bersuku Jawa “transmigran” yang berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, sebagian masyarakat Pekon yang merupakan suku Sunda, suku Palembang, Lampung dan suku Batak.

Pemerintah Pekon bermitra dengan Badan Himpunan Pekon (BHP) selalu berupaya untuk membangun, menumbuh kembangkan potensi pekon, partisipasi dan upaya masyarakat guna terwujudnya pekon

yang maju, dengan harapan Pekon Patoman menjadi baik, indah dan nyaman.

Menurut cerita orang yang lahir pertama di pekon ini adalah Sastro Suparto pada tahun kurang lebih 1883 sedangkan kepala pekon pada tahun 1931 adalah Sastro Suparto, dan Pekon Patoman pada waktu itu berdiri dari enam pedukuhan kemudian pada Tahun 2004, Pekon Patoman mengalami pemekaran pedukuhan yaitu Pedukuhan Gemahriyah yang menjadi pekon sendiri.

Maka sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2011 Pekon Patoman terdiri dari lima pedukuhan. Awal tahun 2011 Pekon Patoman mengalami pemekaran lagi yaitu Pedukuhan Padangrejo menjadi Pekon. Mulai dari Tahun 2011 Pekon Patoman terdiri dari empat pedukuhan hingga sekarang.

b. Jumlah Penduduk

**Tabel 5. Jumlah Penduduk Patoman**

No	Jenis	Jumlah	Satuan
1.	Laki-laki	2.299	Orang
2.	Perempuan	2.222	Orang
3.	Jumlah kepala keluarga	1.259	KK
Jumlah total jiwa		4.521	Jiwa

Diolah oleh peneliti 2018

c. Kondisi Sosial Pekon Patoman

Pekon Patoman adalah sebuah pekon yang ada di wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Dimana keadaan masyarakat Pekon Patoman sangat agamis oleh karena adanya beberapa lembaga pendidikan pesantren yang ada di Pekon Patoman. Perkembangan penduduk di Pekon Patoman saat ini masih bisa dikategorikan sedang, hal ini karena didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan menata kehidupan melalui program keluarga berencana. Pada sektor pendidikan, data penyandang buta huruf di Pekon Patoman semakin berkurang. hal ini didukung dengan adanya program pemerintah tentang usia wajib belajar sembilan tahun.

d. Kondisi Pemerintahan Pekon

1. Pembagian Wilayah Pekon

Setiap dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun. sedangkan posisi kepala dusun menjadi sangat strategis seiring banyaknya limpahan tugas pekon kepada aparat pekon. Dalam rangka memaksimalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat, adapun struktur keorganisasian yang di pimpin oleh kepala dusun membawahi langsung kepada ketua RT. Selain itu menjadikan efisiensi kerja RT dalam menyampaikan aspirasi masyarakat begitu juga sebaliknya dalam menyampaikan berita dari aparat pekon ke wilayah RT.

**Tabel 6. Wilayah Dusun Pekon Patoman**

No.	Nama Dusun	Jumlah RT
1.	Dusun 1	6
2.	Dusun 2	4
3.	Dusun 3	3
4.	Dusun 4	3

Diolah oleh peneliti 2018

e. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Patoman

**Tabel 7. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Patoman**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Sudiyono	Kepala Pekon	SLTA
2.	Risdianto	Sekretaris Desa	SMA
3.	Gito Purboyo	Kaur Pemerinthan	SLTA
4.	Saji Jamzuri	Kaur Kesra	SLTA
5.	Nur Subkhi	Kaur Keuangan	SMA
6.	Edi Sulisto	Kaur Pembangunan	SMA
7.	Tris Aryadi	Kaur Umum	SMA

Diolah oleh peneliti 2018

## f. RPJM Pekon Patoman 2017

**Tabel 8. RPJM Patoman 2017**

## 1. Kebijakan Pendapatan Pekon

No	Pendapatan	Tahun Lalu (Rp)	Tahun Ini (Rp)	Tahun Depan (Rp)
1.	Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa Hasil Kekayaan Desa Hasil Swadaya Dan Partisipasi Hasil Gotong Royong Lain-Lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah.			
2.		516.147.000	498.720.000	
3.	Alokasi Dana Desa	616.088.438	786.166.667	
4.	Dana Desa			
	Dana Bagi Hasil			
5.	Pajak Dan Restribusi Bantuan Keuangan Kab/Prop	5.600.000	6.000.000	
JUMLAH		1.137.835.438	1.290.886.667	

## 2. Kebijakan Belanja Desa

## Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Belanja Pegawai		
	Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Pekon	36.000.000	
	Penghasilan Kepala Pekon	25.200.000	
	Penghasilan Sekretaris Pekon	90.000.000	
	Penghasilan 5 orang Kaur	72.000.000	
	Penghasilan 4 orang Kadus		
	Tunjangan Jabatan	6.000.000	
	Tunjangan Kepala Pekon	4.200.000	
	Tunjangan Sekretaris Pekon	15.000.000	
	Tunjangan 5 orang Kaur	4.800.000	
	Tunjangan 4 orang Kadus	5.100.000	
	Tunjangan Kesehatan		
	Tunjangan Ketua dan Anggota BHP	6.000.000	
	Tunjangan Ketua BHP	4.800.000	
	Tunjangan Wakil Ketua BHP	3.600.000	
	Tunjangan Sekretaris BHP	18.000.000	

	Tunjangan 6 orang Anggota BHP Insentif 16 Ketua Rt	86.400.000	
1	Operasional Perkantoran		
	Belanja ATK Pemerintah Desa	2.116.000	
	Benda Pos	450.000	
	Pakaian Dinas	11.000.000	
	Listrik	1.200.000	
	Surat Kabar	1.980.000	
	Belanja Foto copy, cetak dan Penggadaan dokumen	1.544.000	
	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/bendera	1.500.000	
	Honorarium	3.740.000	
	Belanja rapat kegiatan	1.000.000	
2.	BELANJA MODAL		
	A. Pengadaan peralatan Kantor	15.650.000	
	B. Pemeliharaan bangunan gedung	18.500.000	
	C. Pengadaan penerangan jalan lingkungan	12.975.000	
	D. Pengadaan Instalasi listrik dan telepon	5.750.000	
3	Belanja Operasional BHP		
	ATK	2.500.000	
	Benda Pos	210.000	
	Penggandaan dokumen	490.000	
	Seragam	1.800.000	
	Konsumsi Rapat	1.500.000	
4	Belanja Operasional LPM		
	ATK	2.165.000	
	Benda Pos	210.000	
	Penggandaan dokumen	490.000	
	Insentif LPM	2.700.000	
	Konsumsi Rapat	935.000	
5	Operasional RT		
	ATK	750.000	
	Penggandaan	450.000	
	Konsumsi Rapat	500.000	
	Insentif RT 16 orang	4.800.000	

### Belanja Bidang Pembangunan

1.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jumlah	Ket
	Talud	290.130.000	
	Pembangunan Rabat Beton	37.525.000	
	Pengaspalan Jalan	154.400.000	
	Pembangunan Gorong-gorong	20.397.000	
	Rehab Balai Pekon	7.680.000	

### Belanja Bidang Pembinaan

1.	Pelaksanaan Pembinaan kemasyarakatan Desa	Jumlah	Ket
	1. Pembinaan Linmas	12.800.000	
	2. Kegiatan Majelis Taklim	22.500.000	
	3. Pengembangan Keolahragaan	4.000.000	

### Belanja Bidang Pemberdayaan

1.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah	Ket
	Belanja Operasional TP-PKK	4.000.000	
	Belanja Operasional Posyandu	8.000.000	
	Kegiatan Karang Taruna	2.500.000	
	Kegiatan LPM	2.500.000	
	Pengadaan Lumbung Darah	20.000.000	
	Penambahan Modal BUMDes	200.000.000	

### Belanja Tak Terduga

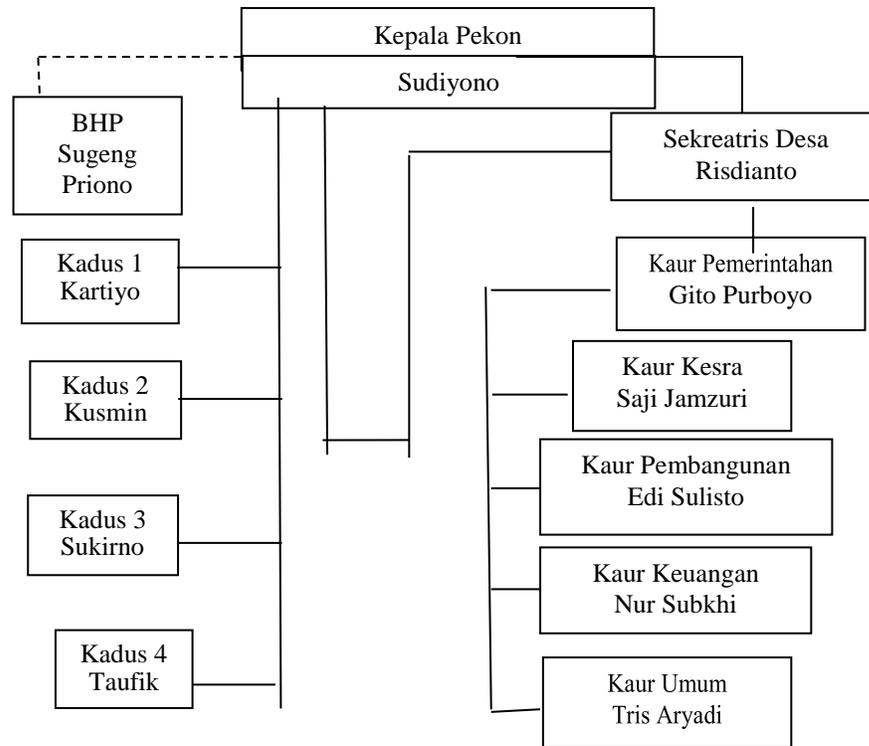
1.	Belanja Tak Terduga	Jumlah	Ket
	1. Bencana Alam		

### Belanja Pembiayaan

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1	Pembiayaan		
	1. Cadangan Pilkades		
	2. Dana Cadangan Purna Tugas Kades dan Perangkat Desa		

Sumber: RPJMDes 2017

## g. Struktur Organisasi Pemerintahan Pekon Patoman



Gambar 3. Struktur Organisasi Pekon Patoman  
Diolah oleh peneliti, Sumber RPJMDes Tahun 2017

### 3. Pekon Margakaya

#### a. Sejarah pekon

Sejarah Pekon Margakaya diawali dengan berdirinya perkampungan (Tiuh) yang berada pada pinggir aliran sungai Way Tebu, selanjutnya sekelompok masyarakat dari Jawa melalui program kolonisasi oleh Pemerintah kolonial Hindia Belanda juga membuka area pemukiman baru dengan membatasi hutan bambu yang cukup lebat di sekitar Tiuh Margakaya.

Begitu banyaknya pohon bambu yang mereka buka tersebut, oleh masyarakat pekon yang baru di buka tersebut dinamakan Pringsewu, yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya bambu seribu. Saat ini daerah yang dahulunya hutan bambu menjelma menjadi sebuah kota yang cukup maju dan ramai di Provinsi Lampung. Margakaya itu sendiri nama yang diabadikan untuk nama pekon setelah nama Pringsewu berkembang menjadi ibu kota kecamatan dan kabupaten.

Pekon Margakaya mempunyai luas wilayah 373 Ha, 70 % lahan daratan yang digunakan untuk lahan pertanian sawah dan pemukiman. Sedangkan 30% pegunungan yang digunakan sebagai kebun dan hutan rakyat. Seiring dengan perkembangan jaman Pekon Margakaya saat ini sudah banyak perubahan yang sangat signifikan. Yang mana masyarakat yang menghuni Pekon Margakaya bukan hanya

masyarakat pribumi, namun ada 3 (tiga) suku yang menghuni Pekon Margakaya yaitu: suku asli Lampung Pubian, suku Banten dan suku Jawa. Pekon Margakaya terdiri dari 3 dusun dan 14 RT.

b. Daftar Pendidikan Terakhir Aparatur Margakaya

**Tabel 9. Pendidikan Aparatur Pekon Margakaya**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Abidin	Kepala Pekon	SLTA/Sederajat
2.	Sekarpanca	Juru tulis	D-3
3.	Basid	Kaur Pemerinthan	D-3
4.	Anisa	Kaur Kesra	SMA/Sederajat
5.	Muhtarudin	Kaur Keuangan	S-1
6.	Leni	Kaur Umum	SMA
7.	Budi Utomo	Kaur Pembangunan	SLTA/Sederajat

Diolah oleh peneliti 2018

c. Strategi Pembangunan Desa

Program Pekon Margakaya dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pekon Margakaya sebagai sentra pengembangan hortikultura. Fokus pengembangan hortikultura yaitu pada komoditi-komoditi sayuran yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan pekon;
2. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat;
3. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan;

4. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
  5. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli pendidikan;
  6. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai gotong royong, efektif dan efisien, akuntabel, transparansi, etos kerja dan religius.
  7. Menetapkan prioritas pengembangan pekon.
- d. Arah Kebijakan Keuangan Pekon Margakaya
1. Arah kebijakan keuangan pekon mau diarahkan lebih fokus pada bidang tertentu, misalnya penguatan aparatur pekon, sarana prasarana, sistem, dan lain-lain maka fokus anggaran pada penyelenggaraan pembangunan pekon, atau pembangunan infrastruktur, pemberdayaan.
- e. Kebijakan Umum
- Dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Pekon Margakaya, maka ditetapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Pringsewu dan Provinsi Lampung maka arah kebijakan adalah:
1. Peningkatan ekonomi masyarakat, kebijakan ini diarahkan untuk:
    - a. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan Masyarakat;
    - b. Mengembangkan usaha agribisnis;
    - c. Mengusahakan kesejahteraan masyarakat.

2. Peningkatan pendidikan masyarakat kebijakan ini diarahkan untuk:
  - a. Meningkatkan Pendidikan masyarakat;
  - b. Melestarikan budaya gotong-royong;
  - c. Memacu pembangunan Pekon dan Kecamatan.
3. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Arah kebijakannya adalah:
  - a. Memberdayakan masyarakat dalam usaha pembangunan ekonomi masyarakat;
  - b. Pemberdayaan lembaga sosial dan pendidikan masyarakat untuk menunjang pembangunan;
  - c. Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
4. Program Pembangunan Desa

Untuk menjabarkan visi, misi dan kebijakan maka disusun program Pekon Margakaya yang mengacu pada program Kecamatan Pringsewu yaitu :

  - a. Peningkatan ekonomi masyarakat;
  - b. pengembangan partisipasi masyarakat;
  - c. pemberdayaan masyarakat;
  - d. peningkatan sdm masyarakat (pendidikan dan iptek);
  - e. peningkatan kualitas hidup (kesehatan dan imtaq);
  - f. peningkatan kehidupan sosial masyarakat (sarana dan prarana).

## f. RPJMDes Perubahan 2017

**Tabel 10. RPJM Perubahan Tahun 2017 Pekon Margakaya**

No	Peringkat Tindakan	RPJM- Pekon 2017		RKP- Pekon 2017		Ket
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Insentif RT dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan APB- Pekon	Insentif RT	1. Insentif RT	Insentif RT	1. Insentif RT	Rutin
2	Penyusunan penghasilan tetap dan tunjangan dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan APB- Pekon	Belanja Kepala Pekon, Sekretaris Pekon dan Perangkat Pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon</li> <li>2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Pekon</li> <li>3. Honorarium Staf Pekon dan Kepala Dusun</li> </ol>	Belanja Kepala Pekon, Sekretaris Pekon dan Perangkat Pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Pekon</li> <li>2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Pekon</li> <li>3. Honorarium Staf Pekon dan Kepala Dusun</li> </ol>	Rutin

3	Penyusunan tunjangan dan operasional BHP dalam RPJM- Pekon, RKP - Pekon dan APB- Pekon	Tunjangan dan Operasional BHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tunjangan anggota BHP</li> <li>2. Rapat Rutin</li> <li>3. Percetakan Adm. BHP</li> <li>4. ATK BHP</li> <li>5. Biaya Monev kinerja Pem-Pekon &amp; Evaluasi LPPD</li> <li>6. Rapat Paripurna BHP dan Pem- Pekon</li> </ol>	Tunjangan dan Operasional BHP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tunjangan anggota BHP</li> <li>2. Rapat Rutin</li> <li>3. Percetakan Adm. BHP</li> <li>4. ATK BHP</li> <li>5. Biaya Monev kinerja Pem-Pekon &amp; Evaluasi LPPD</li> <li>6. Rapat Paripurna BHP dan Pem-Pekon</li> </ol>	Rutin
4	Penyusunan operasional pem- Pekon dari ATK, perlengkapan peralatan kantor, pemeliharaan gedung balai Pekon, pemeliharaan peralatan kantor,, musyawarah Pekon, rapat ruitn, perjalanan dinas, monitoring & evaluasi, , bayar listrik, Bayar PAM, , langganan Koran, biaya cetak adm.kantor,, perawatan kend. Dinas. Pembelian alat kebersihan, penyusunan monografi/profil Pekon, biaya pelaporan	Program Operasional Pemerintahan Pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK Pem-Pekon</li> <li>2. Perlengkapan dan Peralatan Kantor</li> <li>3. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Balai Pekon</li> <li>4. Musyawarah Pekon</li> <li>5. Rapat Rutin</li> <li>6. Perjalanan Dinas</li> <li>7. Moitoring &amp; Evaluasi</li> <li>8. Bayar Listrik</li> <li>9. Bayar PAM</li> <li>10. Langganan</li> </ol>	Program Operasional Pemerintahan Pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK Pem-Pekon</li> <li>2. Perlengkapan dan Peralatan Kantor</li> <li>3. Pemeliharaan Gedung Kantor dan Balai Pekon</li> <li>4. Musyawarah Pekon</li> <li>5. Rapat Rutin</li> <li>6. Perjalanan Dinas</li> <li>7. Moitoring &amp; Evaluasi</li> <li>8. Bayar Listrik</li> <li>9. Bayar PAM</li> <li>10. Langganan Koran</li> </ol>	Rutin

			Koran 11. Cetak Adminstrasi Kantor 12. Perawatan Kendaraan Inventaris 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monoografi/ Profil Pekon 15. Penyusunan Laporan		11. Cetak Adminstrasi Kantor 12. Perawatan Kendaraan Inventaris 13. Pembelian alat kebersihan 14. Penyusunan Monoografi/ Profil Pekon 15. Penyusunan Laporan	
--	--	--	---	--	--	--

5	Pembangunan gorong-gorong dan jembatan plat beton yang diprogramkan dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan RAPB- Pekon	Program Pelayanan Dasar Infrastruktur	1. Pembangunan Gorong-gorong di Dusun I dan II 2. Pembangunan Jembatan Plat Beton di Dusun I dan II	Program Pelayanan Dasar Infrastruktur	1. Pembangunan Gorong-gorong di Dusun I dan II 2. Pembangunan Jembatan Plat Beton di Dusun I dan II	Pelaks. Pemb. Pekon
6	Diprogramkannya pembangunan Rehab. Gedung Kantor balai Pekon dan pembangunan kantor/ruang kelembagaan Pekon dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan APB- Pekon	Program Pemerintahan Pekon	1. Pembangunan Pagar Balai Pekon 2. Rehabilitasi Gedung/Kantor or Pekon 3. Pembangunan Ruang/Kantor BHP	Program Pemerintahan Pekon	1. Pembangunan Pagar Balai Pekon 2. Rehabilitasi Gedung/Kantor Pekon 3. Pembangunan Ruang/Kantor BHP	Pelaks. Pemb. Pekon

			<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembangunan Ruang/Kantor PKK</li> <li>5. Pembangunan Ruang/Kantor LPM</li> <li>6. Pembangunan Kantor/Ruang Babinkamtibmas</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembangunan Ruang/Kantor PKK</li> <li>5. Pembangunan Ruang/Kantor LPM</li> <li>6. Pembangunan Kantor/Ruang Babinkamtibmas</li> </ol>	
7	- Pembangunan sumur bor disetiap Dusun dan pompanisasi yang diprogramkan dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan APB-Pekon	Program Kebutuhan Primer Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Sumur Bor Di Dusun I-III</li> <li>2. Pompanisasi Di Dusun II</li> </ol>	Program Kebutuhan Primer Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Sumur Bor Di Dusun I-III</li> <li>2. Pompanisasi Di Dusun II</li> </ol>	Pelaksanaan Pembangunan Pekon
8	Pembangunan Pengaspalan/underlagh, rabat beton dan paving block yang diprogramkan dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan RAPB- Pekon	Program Pelayanan Dasar Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Underlagh di Dusun I III</li> <li>2. Pengaspalan Jalan Di Dusun I-III</li> <li>3. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun I-III</li> <li>4. Pembangunan Paving Block di Dusun I-III</li> </ol>	Program Pelayanan Dasar Infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Underlagh di Dusun I III</li> <li>2. Pengaspalan Jalan Di Dusun I-III</li> <li>3. Pembangunan Jalan Rabat Beton di Dusun I-III</li> <li>4. Pembangunan Paving Block di Dusun I-III</li> </ol>	Pelaks. Pemb. Pekon
9	Penyusunan pembiayaan biaya operasional dan pembinaan ormas dalam RAPB- Pekon	Program Pembinaan Kemasyarakatan Pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Operasional PKK</li> <li>2. Biaya Operasional</li> </ol>	Program Pembinaan Kemasyarakatan Pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Operasional PKK</li> <li>2. Biaya Operasional</li> </ol>	Pembin. Kemasy

			<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan Posyandu</li> <li>3. Biaya Operasional Kegiatan Seni dan Budaya</li> <li>4. Biaya Operasional kegiatan Karang / Taruna/Pemuda</li> <li>5. Biaya Operasional Kegiatan Kelompok Tani</li> <li>6. Biaya operasional kegiatan Keagamaan</li> <li>7. Biaya operasional kegiatan Linmas dan Hansip</li> <li>8. Biaya operasional kegiatan LPM</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan Posyandu</li> <li>3. Biaya Operasional Kegiatan Seni dan Budaya</li> <li>4. Biaya Operasional kegiatan Karang / Taruna/Pemuda</li> <li>5. Biaya Operasional Kegiatan Kelompok Tani</li> <li>6. Biaya operasional kegiatan Keagamaan</li> <li>7. Biaya operasional kegiatan Linmas dan Hansip</li> <li>8. Biaya operasional kegiatan LPM</li> </ul>	
10	Diprogramkannya pengadaan Bibit dan Sarana Produksi Pertanian, dibuatnya lumbung padi dan ditingkatkannya	Program Pelayanan Dasar Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Bibit</li> <li>2. Pengadaan Sarana &amp; Prasarana</li> </ul>	Program Pelayanan Dasar Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Bibit</li> <li>2. Pengadaan Sarana &amp; Prasarana</li> </ul>	Pembin. Kemasy

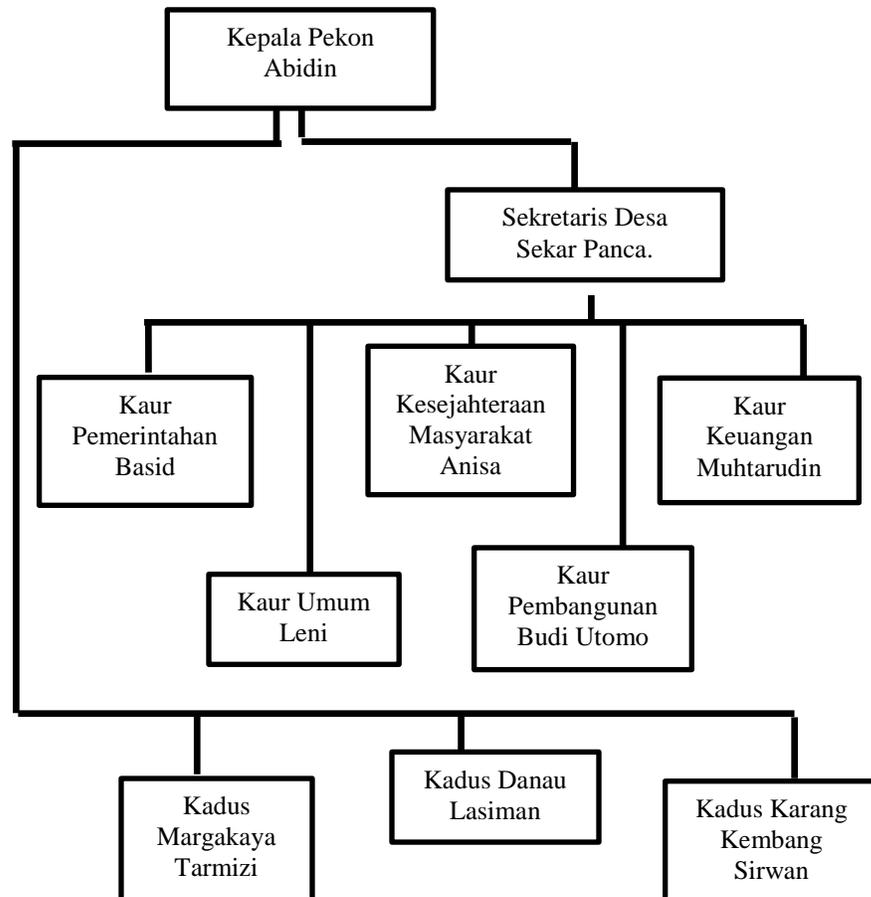
	penyuluhan pertanian		Pertanian 3. Pembuatan Lumbung Padi		Pertanian 3. Pembuatan Lumbung Padi	
--	----------------------	--	--	--	---	--

No	Peringkat Tindakan	RPJM- Pekon 2017		RKP- Pekon 2017		Ket
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7
11	Diprogramkannya pembangunan saluran drainase dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan APB- Pekon	Program Pelayanan Dasar Infrastruktur	1. Pembangunan Saluran Drainase	Program Pelayanan Dasar Infrastruktur	1. Pembangunan Saluran Drainase	Pelaks. Pemb. Pekon
12	Pengadaan sarana dan prasarana social antara lain : -Tenda -Kursi Plastik -Meja - Alat-alat gerabah - Alat alat kematian - Tiang listrik dll yang dimasukkan dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan RAPB- Pekon	Program Penunjang Kegiatan Soaial	1. Pengadaan Tenda 2. Pengadaan Kursi Plastik 3. Pengadaan Meja 4. Pengadaan Alat Gerabah 5. Pengadaan Alat dan perlengkapan kematian 6. Pengadaan tiang listrik	Program Penunjang Kegiatan Soaial	1. Pengadaan Tenda 2. Pengadaan Kursi Plastik 3. Pengadaan Meja 4. Pengadaan Alat Gerabah 5. Pengadaan Alat dan perlengkapan kematian 6. Pengadaan tiang listrik	Pembin. Kemasy
13	Disusunnya anggaran pengadaan peraltan kantor Pekon dalam RPJM- Pekon, RKP- Pekon dan RAPB- Pekon	Program Pemerintahan Pekon	1. Pengadaan Laptop 2. Pengadaan LCD 3. Pengadaan Printer	Program Pemerintahan Pekon	1. Pengadaan Laptop 2. Pengadaan LCD 3. Pengadaan Printer	Penyelen gg. Pemeeri. Pekon

			4. Pengadaan Sound		4. Pengadaan Sound	
--	--	--	-----------------------	--	-----------------------	--

Sumber: RPJMDes Pekon Margakaya

## g. Struktur Organisasi Pekon Margakaya



Gambar 4. Struktur Organisasi Pekon Margakaya  
Diolah oleh peneliti 2018, sumber Profil Pekon Margakata

#### 4. Pekon Rejosari

##### a. Sejarah Pekon Rejosari

Tahun 2002 Pekon Rejosari merupakan hasil dari pemekaran Pekon Induk Podomoro tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2002 prasasti pemerintahan Pekon Rejosari ditandatangani oleh Bupati Achmad Syahputra saat itu masih satu Kabupaten Tanggamus. Seiring berjalannya pemerintahan yang dikepalai oleh seorang kepala pekon PJs, Zainudin. Membentuklah kepanitiaan untuk kepentingan pemilihan Kepala Pekon Definitiv. Hi. Selamat Riyadi terpilih sebagai Kepala Pekon Definitiv pertama beliau memimpin pemerintahan ini sampai dengan 2 kali periode 2002-2013.

Tahun 2013 Hi. Selamat Riyadi mnengundurkan diri dari kepala pekon aehubungan dengan ikut berpartisipasi dalam penclaonan Dewan Perwakilah Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pringsewu, dalam masa transisi kepemimpinan Rejosari dijabat oleh Pjs, Lukman Makhfut belum selesai masa tugasnya yang bersangkutan meletakkan jabatan untuk ikut dalam pencalonan Kepala Pekon Rejosari.

Kosongnya pejabat kepala pekon, BHP Pekon Rejosari mengumpulkan adanya pengisian pejabat, Rokhimanudin sebagai pejabat Plt, Kepala Pekon Rejosari menghantarkan sampai terpilihnya kepala pekon yang baru, untuk selanjutnya Mispan Heri Suyoto kepala Pekon terpilih dengan surat Keputusan Bupati Pringsewu Nomor

B/SKEP/399/KPTS/LT.04/3013. Pekon Rejosari memiliki luas wilayah 165 Ha.

- b. Daftar pendidikan terakhir aparat pekon

**Tabel 11. Pendidikan Terakhir Aparatur Pekon Rejosari**

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Mispan Heri S..	Kepala Pekon	SLTA/Sederajat
2.	Ferly Pramudio	Juru tulis (Sekdes)	SMA
3.	Saryono	Kaur Pembangunan	SMA/Sederajat
4.	Erma Febri .L.	Kaur Pemerintahan	SMA
5.	Sudirman	Kaur Umum	SMEA
6.	Susanti	Kaur Keuangan	D-1
7.	Siti Sapriyah	Kaur Kesehatan Masyarakat (Kesra)	SMEA

Diolah oleh peneliti 2018

## c. RPJM Pekon Rejosari 2017

**Tabel 12. RPJM Pekon Rejosari**

	Peringkat Tindakan	RPJM Pekon Rejosari Tahun 2017		RKP Pekon Rejosari Tahun 2017		Keterangan
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan Tunjangan RT dalam RPJM Pekon RKP-Pekon dan APB-Pekon	Tunjangan RT	1. Tunjangan RT	Tunjangan RT	1. Tunjangan RT	Rutin
4	Penyusunan penghasilan tetap dan tunjangan dalam RPKM-Pekon, RKP-Pekon dan APB-Pekon	Belanja kepala pekon dan perangkat pekon	1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala pekon 2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat pekon dan kepala dusun	Belanja kepala pekon dan perangkat pekon	1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala pekon 2. Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat pekon dan kepala dusun	Rutin
	Penyusunan tunjangan dan operasional BHP dalam RPJM-Pekon, RKP Pekon dan APB-Pekon	Tunjangan dan operasional BHP	1. Tunjangan anggota BHP 2. Rapat rutin 3. Percetakan adm. Bhp 4. Atk bhp 5. Biaya monev kinerja pem- pekon dan evaluasi LPPD 6. Rapat paripurna	Tunjangan dan operasional BHP	1. Tunjangan anggota BHP 2. Rapat rutin 3. Percetakan adm. Bhp 4. Atk bhp 5. Biaya monev kinerja pem- pekon dan evaluasi LPPD 6. Rapat paripurna	Rutin

			BHP dan Pemerintahan pekon		BHP dan Pemerintahan pekon	
	Penyusunan perasional pemerintahan pekon dari ATK, perawatan kendaraan dinas, rekening langganan koran, pemeliharaan gudang kantor, cetak administrasi kantor, perjalanan dinas, biaya rapat rutin, rapat LPPD, honorarium, operasional BHP, peralatan dan perlengkapan kantor, biaya pelaporan	Program Operasional pemerintahan pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK pemerintahan pekon</li> <li>2. Perlengkapan dan peralatan kantor</li> <li>3. Pemeliharaan gedung kantor dan balai pekon</li> <li>4. Musyawarah pekon</li> <li>5. Rapat rutin</li> <li>6. Perjalanan dinas</li> <li>7. Monev</li> <li>8. Biaya listrik</li> <li>9. Bayar PAM</li> <li>10. Langganan koran</li> <li>11. Cetak administrasi kantor</li> <li>12. Perawatan kendaraan investaris</li> <li>13. Pembelian alat kebersihan</li> <li>14. Penyusunan monografi.profil pekon</li> <li>15. Penyusunan laporan</li> <li>16. Honorarium</li> </ol>	Program Operasional pemerintahan pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK pemerintahan pekon</li> <li>2. Perlengkapan dan peralatan kantor</li> <li>3. Pemeliharaan gedung kantor dan balai pekon</li> <li>4. Musyawarah pekon</li> <li>5. Rapat rutin</li> <li>6. Perjalanan dinas</li> <li>7. Monev</li> <li>8. Biaya listrik</li> <li>9. Bayar PAM</li> <li>10. Langganan koran</li> <li>11. Cetak administrasi kantor</li> <li>12. Perawatan kendaraan investaris</li> <li>13. Pembelian alat kebersihan</li> <li>14. Penyusunan monografi.profil pekon</li> <li>15. Penyusunan laporan</li> <li>16. Honorarium</li> </ol>	Rutin

	Pembangunan gorong-gorong dan jembatan plat beton yang diprogramkan dalam RPJM-Pekon, RKP-Pekon dan RAPB-Pekon	Program pelayanan dasar infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gorong-gorong di Dusun I dan II</li> <li>2. Pembangunan jembatan plat beton di Dusun I dan II</li> </ol>	Program pelayanan dasar infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan gorong-gorong di Dusun I dan II</li> <li>2. Pembangunan jembatan plat beton di Dusun I dan II</li> </ol>	Pelaksana pembangunan pekon
	Penyusunan pembiayaan biaya operasional dan pembinaan ormas dalam RAPB-Pekon	Program pembinaan kemasyarakatan pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya operasional PKK</li> <li>2. Biaya operasional kegiatan posyandu</li> <li>3. Biaya operasional kegiatan seni dan budaya</li> <li>4. Biaya kegiatan karang taruna/pemuda</li> <li>5. Biaya operasional kegiatan kelompok tani</li> <li>6. Biaya operasional keagamaan</li> <li>7. Biaya operasional kegiatan Linmas dan Hansip</li> <li>8. Biaya operasional kegiatan LPM</li> </ol>	Program pembinaan kemasyarakatan pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya operasional PKK</li> <li>2. Biaya operasional kegiatan posyandu</li> <li>3. Biaya operasional kegiatan seni dan budaya</li> <li>4. Biaya kegiatan karang taruna/pemuda</li> <li>5. Biaya operasional kegiatan kelompok tani</li> <li>6. Biaya operasional keagamaan</li> <li>7. Biaya operasional kegiatan Linmas dan Hansip</li> <li>8. Biaya operasional kegiatan LPM</li> </ol>	Pembinaan kemasyarakatan
	Dipromkannya pembangunan Rehab, Gedung Kantor balai desa dan pembangunan kantor/ruang kelembagaan desa dalam RPJM-Pekon, RKP-Pekon dan APB-	Program pemerintahan pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pagar balai desa</li> <li>2. Rehabilitasi gedung/kantor desa</li> <li>3. Pembangunan ruang/kantor bhp</li> </ol>	Program pemerintahan pekon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan pagar balai desa</li> <li>2. Rehabilitasi gedung/kantor desa</li> <li>3. Pembangunan ruang/kantor bhp</li> </ol>	Pelaksana pembangunan pekon

	Pekon		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembangunan ruang/kantor PKK</li> <li>5. Pembangunan ruang/kantor LPM</li> <li>6. Pembangunan kantor/ruang Babinkamtibnas</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pembangunan ruang/kantor PKK</li> <li>5. Pembangunan ruang/kantor LPM</li> <li>6. Pembangunan kantor/ruang Babinkamtibnas</li> </ol>	
	Pembangunan sumur bor disetiap dusun dan pompanisasi yang diprogramkan dalam RPJM-Pekon , RKP-Pekon dan APB-Pekon	Program kebutuhan primer pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Sumur Bor di Dusun I Dan II</li> <li>2. Pompanisasi di Dusun II</li> </ol>	Program kebutuhan primer pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Sumur Bor di Dusun I Dan II</li> <li>2. Pompanisasi di Dusun II</li> </ol>	Pelaksana pembangunan pekon
	Pembangunan pengaspalan/onderalgh, rabat beton dan paving block yang diprogramkan dalam RPJPekon, RKP-Pekon dan RAPB-Pekon	Program pelayanan dasar infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Underlath di Dusun I dan II</li> <li>2. Pengaspalan jalan di Dusun I dan II</li> <li>3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun I dan II</li> <li>4. Pembangunan paving block di Dusun I</li> </ol>	Program pelayanan dasar infrastruktur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan Underlath di Dusun I dan II</li> <li>2. Pengaspalan jalan di Dusun I dan II</li> <li>3. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun I dan II</li> <li>4. Pembangunan paving block di Dusun I</li> </ol>	Pelaksana pembangunan pekon

Sumber: RPJMDes Pekon Rejosari

## d. Struktur Organisasi Pekon Rejosari



Gambar 5. Struktur Organisasi Pekon Rejosari  
Diolah oleh peneliti 2018, sumber RPJMDes 2017

## **VI. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan penjabaran pada bab hasil dan pembahasan dapat ditarik simpulan bahwa penyebab rendahnya kemampuan aparatur pekon diwakilkan oleh informan yang mengelola keuangan pekon sebagai berikut:

#### **a. Pekon Patoman**

Rendahnya kemampuan teknis berkaitan dengan pengetahuan tahapan pengelolaan keuangan desa, asas dalam pengelolaan keuangan desa dan juga mengoperasikan komputer guna mempermudah pengelolaan keuangan desa dikarenakan kurangnya inisiatif dari aparatur pekon dalam mengembangkan pengetahuan dengan memanfaatkan teknologi maupun inisiatif mengadakan pelatihan formal bersama pekon lain dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan desa karena hanya mengandalkan pelatihan yang diberikan dinas dan sosialisasi oleh pihak kecamatan. Untuk kemampuan sosial kurangnya koordinasi baik formal maupun informal antaraparatur maupun dengan kepala pekon dan masyarakat, kurangnya kesadaran bekerjasama dengan pekon dalam pengelolaan keuangan desa, dan

terdapat masalah internal antara kepala pekon dengan aparatur pekon, dan pekon belum memiliki grup *WhatsApp*. Untuk kemampuan konseptual alasannya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pengalaman mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga dalam pembuatan RAB sejak tahun 2015-2017 yang mengerjakan adalah sekretaris pekon.

b. Pekon Gemahriyah

Alasan rendahnya kemampuan teknis dikarenakan aparatur belum memahami tahapan dan asas dalam pengelolaan keuangan desa yang disebabkan karena kurangnya SDM pekon yang menyadari ilmu bisa didapat tidak hanya dari pelatihan maupun sosialisasi yang diberikan pihak terkait tetapi juga bisa berasal dari pemanfaatan teknologi. Untuk kemampuan sosial pihak pekon belum memiliki grup *WhatsApp* untuk memudahkan koordinasi. Kemampuan konseptual alasan Pekon Gemahriyah masih kesulitan dalam pembuatan RAB adalah SDM pekon yang kurang menguasai dan memahami dalam perencanaan pembangunan terlebih tempat berkonsultasi sangat minim karena tenaga ahli di kecamatan hanya 1 orang yang membawahi 22 pekon.

c. Pekon Margakaya

Rendahnya kemampuan teknis disebabkan karena rekrutmen aparatur pekon kurang baik, pelatihan mengenai pengelolaan keuangan hanya 1 kali pada Tahun 2015, tidak ada contoh laporan yang disediakan oleh pihak dinas, kurangnya pengalaman aparatur dibidang pengelolaan

keuangan desa sehingga kepala pekon memutuskan untuk memperbantukan Kepala Dusun Danau di balai pekon karena dinilai mampu terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Untuk kemampuan sosial disimpulkan bahwa alasan rendahnya kemampuan dikarenakan koordinasi informal dilakukan hanya jika keadaan mendesak dan tidak ada kerjasama dengan pekon lain dalam pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga pengalaman yang diperoleh mengenai keuangan desa kurang, dan tidak memiliki grup *WhatsApp*. Untuk di kemampuan konseptual aparatur pekon mengalami kesulitan sehingga Kadus Danau diperbantukan alasan lain mengapa untuk kemampuan konseptual rendah karena pendamping Pekon Margakaya tidak memiliki kemampuan dalam bidang pengelolaan keuangan desa.

d. Pekon Rejosari

Kemampuan teknis berkaitan dengan pengetahuan tahapan pengelolaan dan asas pengelolaan keuangan desa rendah disebabkan karena aparatur pekon belum memiliki cukup pengalaman karena terdapat beberapa aparatur muda di pekon tersebut yang masih membutuhkan bimbingan dan juga pengalaman dalam mengelola keuangan desa, hal tersebut juga dikarenakan Pekon Rejosari hanya memanfaatkan pelatihan yang diberikan dinas, inisiatif untuk berlatih bersama pekon lain belum diadakan. Untuk kemampuan sosial tidak memiliki grup *WhatsApp*. Untuk kemampuan konseptual pihak pekon mengandalkan Tim 11 yang bertugas untuk membuat RAB.

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan bahwa pihak dinas dalam meningkatkan kemampuan aparatur melakukan kegiatan pelatihan dan juga memberikan *reward* berupa uang pembinaan, piagam, dan piala dalam kegiatan lomba pekon, namun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengelolaan keuangan desa masih terdapat hambatan yang berasal dari faktor internal dan eksternal dijelaskan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1. Kurangnya kemampuan dan kualitas aparatur di pekon yang dapat memperlambat pembuatan pelaporan keuangan pekon, terutama dalam pengelolaan dana desa, dan pembuatan RAB.
2. Kurangnya rasa tanggungjawab dari aparatur pekon karena yang diutus untuk menghadiri pelatihan yang diadakan oleh pihak dinas tidak seperti yang diundang oleh pihak dinas, sehingga hasil dari pelatihan kurang maksimal.

b. Faktor Eksternal

1. Ketidakberlanjutan pelatihan yang telah diberikan oleh pihak dinas.
2. Masalah yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa terutama dana desa adalah keterlambatan dalam pengumpulan pelaporan dikarenakan kurangnya tenaga ahli di kecamatan, di Dinas PMP, dan juga pendamping desa yang kurang berkualitas sehingga aparatur menemukan kesulitan dalam pengelolaan dana desa tidak ada tempat untuk berkonsultasi.

3. Pelatihan hanya dilakukan satu tahun sekali dengan kegiatan yang berubah-ubah sehingga hasil yang dicapai kurang maksimal seperti aparatur pekon masih kurang memahami dalam pembuatan laporan, dan tidak adanya pedoman khusus mengenai keuangan sehingga pihak pekon mengadopsi dari kegiatan lain.

## **B. Saran**

Untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Pringsewu dan pihak kecamatan seharusnya:

1. Saat diadakan *monitoring* evaluasi melakukan *sharing* dan pendataan terhadap kekurangan masing-masing pekon, dan diklasifikasikan untuk selanjutnya mendapat pelatihan khusus sesuai dengan kekurangan pekon, terutama dalam pembuatan laporan sehingga tidak ada kesalahan *administrative* dalam pengelolaan keuangan pekon.
2. Perlu adanya keberlanjutan dari pelatihan yang diberikan
3. Perlu adanya contoh khusus pelaporan yang bisa di *download* oleh aparatur guna menyelaraskan pelaporan dan agar aparatur tidak kebingungan laporan seperti apa yang benar.
4. Perlu adanya sanksi untuk pekon dalam pengumpulan pelaporan terjadi keterlambatan dan sanksi bagi aparatur yang mengikuti pelatihan tidak sesuai dengan undangan.
5. Perlu adanya tambahan tenaga ahli, sehingga 1 pekon mendapatkan tenaga ahli yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan desa.

6. Perlu adanya reformasi pendamping pekon untuk mendapatkan pendamping yang berkualitas sehingga dapat membimbing aparatur pekon dalam segala bidang.

Untuk aparatur pekon seharusnya:

1. Memilih aparatur pekon harus menerapkan prinsip *right man in the right place* agar pelayanan publik yang diberikan akan maksimal, karena pekon merupakan pemerintah paling bawah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan agar tidak ada lagi kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.
2. Koordinasi sebaiknya dilaksanakan tiap minggu agar intensitas tatap muka dengan sesama aparatur maupun lembaga pekon dan masyarakat dapat terjaga sehingga dapat menciptakan suasana kerja yang baik.
3. Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi aparatur perlu ditingkatkan, dan perlu pelatihan rasa tanggungjawab atas amanat yang telah diterima.
4. Kemandirian dan bekerjasama dengan pekon lain perlu ditingkatkan terutama dalam pengelolaan keuangan desa agar kualitas aparatur semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adisasmita, R. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 210 hlm.
- Adisasmita, R. 2013. *Pembangunan Perdesaan (Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan)*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 174 hlm.
- Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. 2015. *Juklak Badan Pengawasan dan Pembangunan (Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa)*. 132 hlm.
- Kansil. 1988. *Desa Kita: Dalam Peraturan Tata Pemeirntahan Desa (Hukum Administrasi Desa)*. Jakarta: Ghalia. 270 hlm.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*. Jakarta. 114 hlm
- M.A, Ibrahim. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 240 hlm.
- Makmur, Syarif. 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi (Kajian Penyelenggaraan Pemerintahan Desa)*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 216 hlm.
- Moenir, A.S. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara. 228 hlm.
- Robbins, S.P. and Judge, T.A. 2009. *Perilaku Organisasi. Edisi Ketiga Belas*, Jakarta: Salemba. 540 hlm.
- Saiman. 2002. *Manajemen Sekretaris*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 120 hlm.

- Semiawan, Conny R. 1999. *Pendidikan Tinggi (Peningkatan Kemampuan Manusia Sepanjang Hayat Seoptimal Mungkin)*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 215 hlm.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: PT BumiAksara. 212 hlm.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT RinekaCipta. 250 hlm.
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukoco, Badri.M. 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*. Jakarta: Erlangga. 231 hlm.
- Surianingrat, Bayu. 1985. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Aksara Baru. 518 hlm.
- Thoha, Mifta. 2015. *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT RajaGrafindo. 394 hlm.
- Widiyono, dan Pakkana.M. 2013. *Pengantar Bisnis Respon terhadap Dinamika Global*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 269 hlm.
- Widjaja. 1996. *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5/1979 (Sebuah Tinjauan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.. 280 hlm.
- Yahya, Yohanes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 137 hlm.

### **Sumber Resmi**

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## **Jurnal**

- Adrianto, Sopan. 2011. *Pengaruh Keterampilan Teknis, Keterampilan Sosial, Keterampilan Konseptual, Dan Keterampilan Manajerial Terhadap Kinerja Kepala Sekolah Dasar Negeri Di Wilayah Jakarta Pusat.*: Jurnal Management Matematika. Vol. 2. No. 1.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty. 2016. *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund.* Jakarta: Jurnal Penelitian Politik. Vol. 13. No. 2.
- Aristia, Randy. 2015. *Studi Tentang Kemampuan Aparatur Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Kampung Datah Bilang Baru Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.* Ejournal Ilmu Pemerintahan. Vol. 3 No. 1.
- Atmaja, Anantawikrama Tungga dan Komang Adi Kurniawan Saputra. 2017. *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa.* Bali: Universitas Pendidikan Ganesha: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis. Vol. 1. No. 1.
- Munti, Finta Dan Heru Fahlevi. 2017. *Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh.* Kota Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala. Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol. 18 No. 2.

## **Skripsi**

- Eka, Radiana. 2016. *Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang.* Universitas Hasanudin.

## **Laporan Resmi**

- KPK. 2015. *Laporan Hasil Kajian Pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.*

## **Sumber Internet**

- Jun. 2017. Tidak Transparan Kelola Dana Desa Warga Demo Kades. 28 Maret 2017. (<http://www.harianlampung.com/m/index.php?ctn=1#k=kawasan#i=37195>)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Paparan-Kemenkeu.pdf> diakses tanggal 29 Agustus 2017 Pukul 16:35)

Nugroho, Anton S. 2016. *Dana Desa, Pemahaman Aparatur Pekon di Sukoharjo Minim*. Rabu, 13 Juli 2016. Pringsewu (<http://www.saibumi.com/artikel-77862-dana-desa-pemahaman-aparatur-pekon-di-sukoharjo-pringsewu-minim.html#ixzz4xKmjfeLl> diakses tanggal 27 Agustus 2017 pukul 10:02)

Nugroho, Anton S. 2016. *Tiga Pekon di Pringsewu belum Laporkan Penggunaan Dana Desa*. (<http://www.saibumi.com/artikel-72198-tiga-pekon-di-pringsewu-belum-laporkan-penggunaan-dana-desa.html#ixzz4rBbQy3kf>, diakses Tanggal 29 Agustus 2017 Pukul 16:35 WIB)